



Kementerian PPN/
Bappenas



OPEN
GOVERNMENT
INDONESIA

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA AKSI NASIONAL
OPEN GOVERNMENT INDONESIA
VII TAHUN 2022 - 2024
SEMESTER III TAHUN 2024

Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

✉ sekretariat.ogi@bappenas.go.id | @opengovid | Open Government Indonesia

Disusun oleh:

- 1. Maharani Putri S.W**
- 2. Karina Apriladhatin**
- 3. Theodorus Agustinus H**
- 4. Monica Ayuningtyas**

2024

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	1
CATATAN UMUM DAN TINDAK LANJUT RAN OGI VII 2023-2024: SEMESTER I	6
ISU STRATEGIS DAN KOMITMEN RAN OGI VII 2023-2024	7
STRATEGI PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI, DAN PENYUSUNAN LAPORAN...	12
DESKRIPSI CAPAIAN 15 KOMITMEN RAN OGI VII 2023-2024	15
Komitmen 1	15
Komitmen 2	24
Komitmen 3	26
Komitmen 4	28
Komitmen 5	32
Komitmen 6	34
Komitmen 7	36
Komitmen 8	38
Komitmen 9	40
Komitmen 10	43
Komitmen 11	45
Komitmen 12	52
Komitmen 13	57
Komitmen 14	61
Komitmen 15	67

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI) VII Tahun 2023-2024 terdiri atas enam isu strategis, yaitu: 1) anti-korupsi dan anggaran, 2) pelayanan publik yang inklusif, 3) ruang kewargaan dan demokrasi, 4) akses terhadap keadilan, 5) kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI), dan 6) energi, lingkungan, dan sumber daya alam. Enam isu strategis tersebut terbagi dalam 15 komitmen, 37 ukuran keberhasilan dan 302 target capaian yang diimplementasikan oleh 21 Kementerian/Lembaga dan 18 Organisasi Masyarakat Sipil. Untuk Semester III (B18) sendiri, terdapat 64 Target Capaian.

Selama pelaksanaan Semester 3 RAN OGI VII Tahun 2023-2024, terdapat 4 komitmen yang telah memiliki Capaian Administratif Baik, yaitu **Komitmen 1** (Mendorong Transparansi dan Partisipasi dalam Pengadaan Barang.Jasa Pemerintah), **Komitmen 7** (Penyediaan Pedoman Aksesibilitas Digital Layanan Komunikasi dan Informasi Publik yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas), **Komitmen 13** (Penguatan Bantuan Hukum bagi Kelompok Rentan di Indonesia), dan **Komitmen 14** (Penguatan Mekanisme Pemulihan dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual). Jumlah tersebut berkurang dibandingkan pelaksanaan Semester II yang lalu. Hal ini disebabkan oleh tingginya jumlah pemangku kepentingan yang belum melaporkan Data Dukung selama periode pelaporan Monitoring dan Evaluasi B18. Oleh sebab itu, Sekretariat Nasional akan melakukan pertemuan dalam waktu dekat untuk setiap pemangku kepentingan yang belum melaporkan Data Dukung, untuk memastikan kembali capaian dari pelaksanaan RAN OGI VII tahun 2023-2024.

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi secara keseluruhan, ditemukan tiga catatan utama pada pelaksanaan RAN OGI VII Semester 3 (B18) Tahun 2023-2024, Pertama, menurunnya nilai ko-kreasi yang dilaksanakan oleh para aktor Pemerintah maupun Non-Pemerintah, kedua menurunnya jumlah pelaporan dari setiap pemangku kepentingan, Ketiga terbatasnya sumber daya untuk melaksanakan capaian target dalam RAN OGI VII Tahun 2023-2024. Sebagai bentuk tindak lanjut terhadap temuan tersebut, Sekretariat Nasional OGI akan melakukan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan khususnya pada komitmen-komitmen yang mengalami tantangan untuk selanjutnya didiskusikan Strategi Percepatan yang dapat dilakukan untuk mencapai target RAN OGI VII Tahun 2023-2024.

ISU STRATEGIS DAN DAFTAR KOMITMEN RAN OGI VII 2023-2024

Adapun daftar komitmen RAN OGI VII Tahun 2023-2024 yang dikelompokkan berdasarkan isu strategisnya sebagai berikut.

Tabel 1.

Daftar Komitmen RAN OGI VII Tahun 2023-2024 dan Pelaksana

No.	Judul Komitmen	K/L dan OMS Pelaksana
Anti-Korupsi dan Anggaran		
1.	Komitmen 1: Mendorong Transparansi dan Partisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 2. Komisi Informasi Pusat (KIP) 3. Indonesia Corruption Watch (ICW) 4. Transparency International Indonesia (TII)
2.	Komitmen 2: Optimalisasi Implementasi Keterbukaan Data Beneficial Ownership	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Hukum dan HAM 2. Kantor Staf Presiden RI 3. PPATK 4. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal 5. Stranas-PK 6. Kementerian ESDM 7. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 8. Kementerian Pertanian 9. Kementerian ATR/BPN 10. Kementerian Keuangan 11. Publish What you Pay (PWYP), TII, ICW

Ruang Kewargaan dan Demokrasi		
3.	Komitmen 3: Perlindungan Hukum dalam Perkara Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2. Kepolisian Republik Indonesia 3. Auriga Nusantara
4.	Komitmen 4: Mengawal Perumusan Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Komunikasi dan Informatika 2. Yayasan TIFA
5.	Komitmen 5: Penyusunan Mekanisme Penanganan Pemilu dan Disinformasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Pengawas Pemilihan Umum 2. Komisi Pemantau Legislatif (KOPEL)
6.	Komitmen 6: Keterbukaan Tata Kelola Data Pemilihan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
Pelayanan Publik yang Inklusif		
7.	Komitmen 7: Penyediaan Pedoman Aksesibilitas Digital Layanan Komunikasi dan Informasi Publik yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Komunikasi dan Informatika 2. Suarise
8.	Komitmen 8: Akuntabilitas Sosial Keterbukaan Anggaran Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Dalam Negeri 2. TII
9.	Komitmen 9: Akuntabilitas Sosial Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2. Wahana Visi Indonesia 3. TII

Akses terhadap Keadilan		
10.	Komitmen 10: Penyusunan Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR) untuk Memenuhi Hak Atas Kebenaran*	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Hukum dan HAM 2. Yayasan TIFA, Yayasan Indonesia untuk Kemanusiaan, KontraS Aceh
11.	Komitmen 11: Aksesibilitas dan Akuntabilitas Proses Peradilan di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahkamah Agung (MA) 2. Kejaksaan Agung 3. Kepolisian Republik Indonesia 4. Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Asosiasi LBH APIK Indonesia
12.	Komitmen 12: Perluasan Pemberian Bantuan Hukum yang Berkualitas dan Aksesibel di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan HAM 2. MA 3. IJRS, PBHI, Asosiasi LBH APIK Indonesia
13.	Komitmen 13: Penguatan Bantuan Hukum bagi Kelompok Rentan di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPHN 2. IJRS, PBHI, Asosiasi LBH APIK Indonesia
Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI)		
14.	Komitmen 14: Penguatan Mekanisme Pemulihan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

		3. Kementerian Hukum dan HAM 4. International NGO Forum on Indonesian Development, IJRS
Energi, Lingkungan, dan Sumber Daya Alam		
15.	Komitmen 15: Pengembangan Sistem Satu Data Sumber Daya Alam-Lingkungan Hidup (SDA-LH) yang Menjamin Keterbukaan Data dan Informasi Perizinan dan Tata Ruang	1. Sekretariat Satu Data Indonesia 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 5. Indonesia Center for Environmental Law, Auriga Nusantara, PWYP, MediaLink

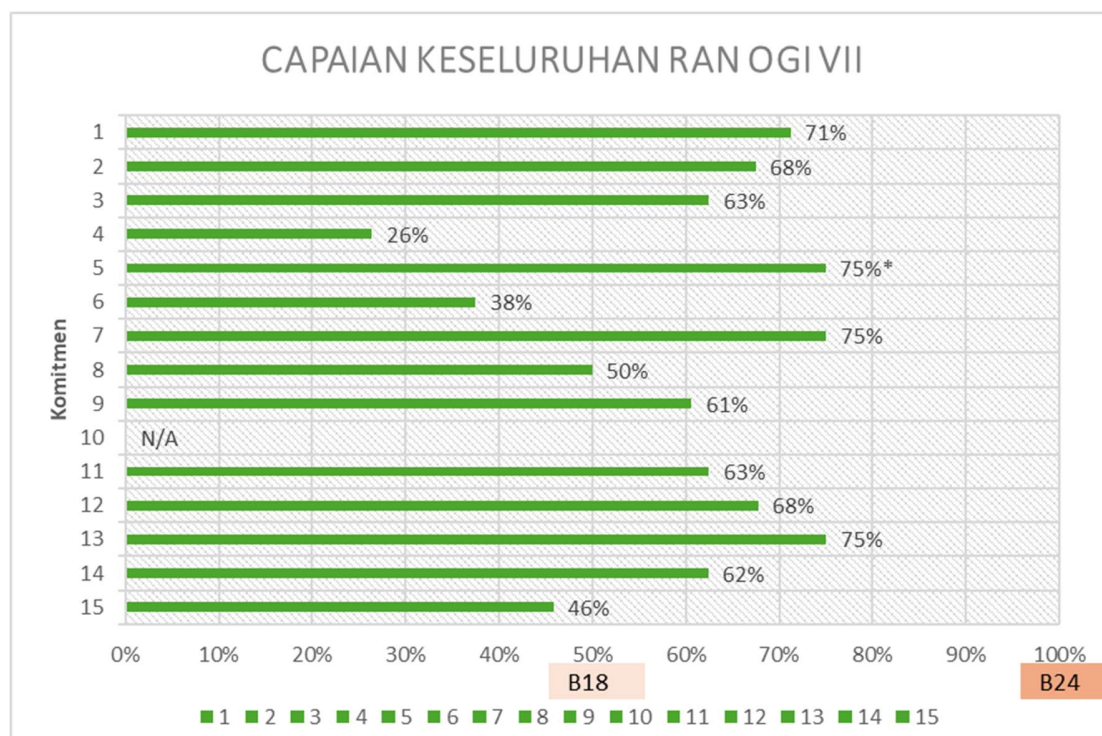
*Komitmen tidak dilanjutkan sehubungan dengan adanya upaya non-yudisial dari pemerintah atas penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.

GAMBARAN UMUM MONEY RAN OGI VII 2023-2024: SEMESTER I - III

Adapun gambaran umum dari temuan monitoring dan evaluasi Semester I - Semester III RAN OGI VII Tahun 2023-2024 sebagai berikut:

1. Perkembangan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional OGI VII Tahun 2023-2024

RAN OGI VII tahun 2023-2024 dilaksanakan sepanjang dua tahun. Pada tahun yang pertama, sebagian besar komitmen telah memperoleh capaian yang positif. Hal tersebut ditunjukkan dari telah dilaksanakannya sebagian target capaian secara baik oleh Kementerian/Lembaga melalui serangkaian proses ko-kreasi dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Perkembangan pelaksanaan RAN OGI VII Tahun 2023-2024 sampai dengan bulan ke-18 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.

Perkembangan Pelaksanaan RAN OGI VII Tahun 2023-2024

Sumber: Rekapitulasi Data Perkembangan Pelaksanaan RAN OGI VII Tahun 2023-2024

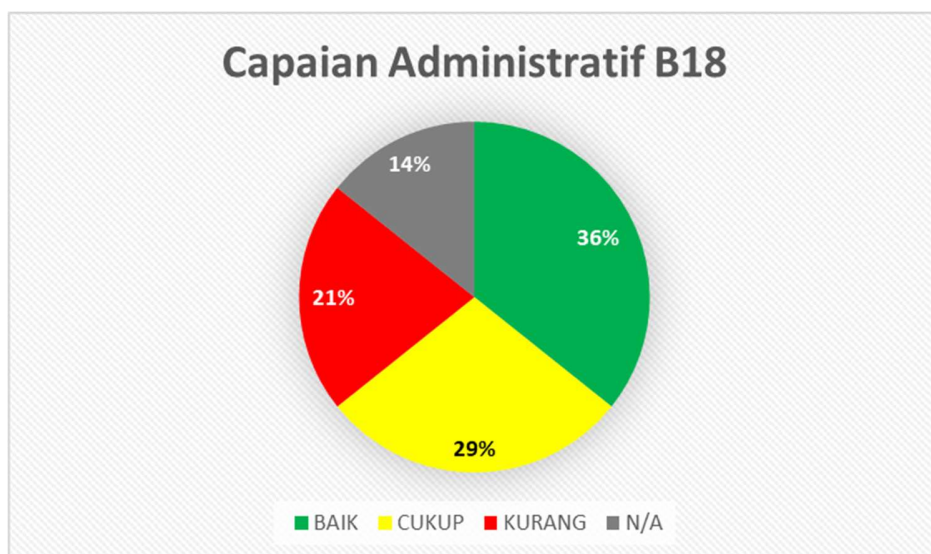
* Komitmen 5 berakhir pada semester III (B18)

2. Capaian Administratif Semester III RAN OGI VII 2023-2024

Capaian administratif merupakan nilai dari hasil kinerja Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil dalam melaksanakan target capaian. Adapun capaian administratif dalam pelaksanaan RAN OGI VII Tahun 2023-2024 Semester III sebagai berikut:

Gambar 2.

Capaian Administratif Pelaksanaan Semester III RAN OGI VII 2023-2024



Sumber: Monitoring dan Evaluasi Semester III Tahun 2024

- a. Dari hasil kegiatan Monitoring dan Evaluasi, **36%** komitmen atau sejumlah **5** komitmen mendapatkan nilai baik yang menunjukkan target capaian telah terlaksana dengan baik. 5 komitmen tersebut antara lain, yakni:

Tabel 2.

Daftar Komitmen dengan Nilai Capaian Administratif Baik

Nomor Komitmen	Judul Komitmen
Komitmen 1	Mendorong Transparansi dan Partisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Komitmen 7	Penyediaan Pedoman Aksesibilitas Digital Layanan Komunikasi dan Informasi Publik yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas
Komitmen 11	Aksesibilitas dan Akuntabilitas Proses Peradilan di Indonesia
Komitmen 13	Penguatan Bantuan Hukum bagi Kelompok Rentan di Indonesia
Komitmen 14	Penguatan Mekanisme Pemulihan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

- b. **29%** komitmen atau sejumlah **4** komitmen mendapatkan nilai cukup yang menunjukkan target capaian belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dan membutuhkan penyelesaian lebih lanjut dari masing-masing *stakeholder* pelaksana. 4 komitmen tersebut, yakni:

Tabel 3.

Komitmen dengan Nilai Capaian Administratif Cukup

Nomor Komitmen	Judul Komitmen
Komitmen 2	Optimalisasi Implementasi Keterbukaan Data Beneficial Ownership
Komitmen 3	Pelindungan Hukum dalam Perkara Lingkungan Hidup
Komitmen 9	Akuntabilitas Sosial Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Desa
Komitmen 12	Perluasan Pemberian Bantuan Hukum yang Berkualitas dan Aksesibel di Indonesia

- c. **21%** komitmen atau sejumlah **3** komitmen mendapatkan nilai kurang yang menunjukkan komitmen tidak dapat diselesaikan secara baik oleh Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil. Kurangnya pencapaian pelaksanaan pada komitmen ini disebabkan oleh tidak dikumpulkannya data dukung oleh *stakeholders* terkait, serta berhentinya program/pendanaan dalam menjalankan aksi dalam komitmen. Adapun 3 komitmen tersebut yakni:

Tabel 4.

Komitmen dengan Nilai Capaian Administratif Kurang

Nomor Komitmen	Judul Komitmen
Komitmen 4	Mengawal Perumusan Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)
Komitmen 5	Penyusunan Mekanisme Penanganan Pemilu dan Disinformasi
Komitmen 8	Akuntabilitas Sosial Keterbukaan Anggaran Desa

- d. **14%** komitmen atau sejumlah **2** komitmen mendapatkan nilai N/A yang menunjukkan tidak adanya data dukung yang disampaikan baik oleh Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil. 2 Komitmen tersebut yakni:

Tabel 5.

Komitmen dengan Nilai Capaian Administratif N/A

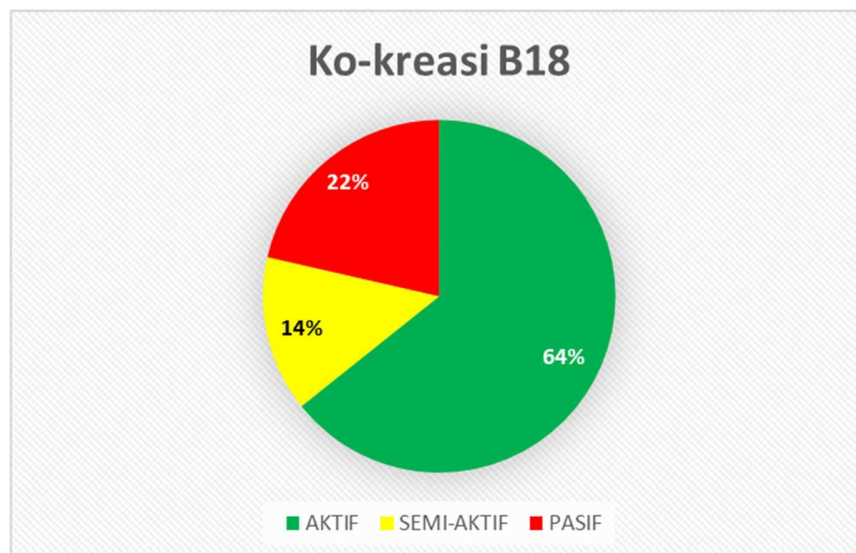
Nomor Komitmen	Judul Komitmen
Komitmen 6	Keterbukaan Tata Kelola Data Pemilihan Umum
Komitmen 15	Pengembangan Sistem Satu Data Sumber Daya Alam-Lingkungan Hidup (SDA-LH) yang Menjamin Keterbukaan Data dan Informasi Perizinan dan Tata Ruang

3. Proses Ko-kreasi Semester III

Proses ko-kreasi merupakan penilaian hasil kerja sama maupun kolaborasi bermakna yang dibangun antar Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil dalam mencapai target capaian. Temuan proses ko-kreasi pelaksanaan RAN OGI VII 2023-2024 pada Semester III adalah sebagai berikut:

Gambar 3.

Proses Ko-kreasi Pelaksanaan Semester III RAN OGI VII 2023-2024



Sumber: Monitoring dan Evaluasi Semester III Tahun 2024

- Dari hasil kegiatan Monitoring dan Evaluasi, **64%** komitmen atau sejumlah **9** komitmen menunjukkan capaian ko-kreasi aktif, yang menunjukkan proses kolaborasi bermakna antara K/L dan OMS berjalan secara baik. 9 komitmen tersebut antara lain, yakni:

Tabel 5.
Daftar Komitmen dengan Nilai Proses Ko-Kreasi Aktif

Nomor Komitmen	Judul Komitmen
Komitmen 1	Mendorong Transparansi dan Partisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Komitmen 2	Optimalisasi Implementasi Keterbukaan Data Beneficial Ownership
Komitmen 3	Perlindungan Hukum dalam Perkara Lingkungan Hidup
Komitmen 7	Penyediaan Pedoman Aksesibilitas Digital Layanan Komunikasi dan Informasi Publik yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas
Komitmen 9	Akuntabilitas Sosial Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Desa
Komitmen 11	Aksesibilitas dan Akuntabilitas Proses Peradilan di Indonesia
Komitmen 12	Perluasan Pemberian Bantuan Hukum yang Berkualitas dan Aksesibel di Indonesia
Komitmen 13	Penguatan Bantuan Hukum bagi Kelompok Rentan di Indonesia
Komitmen 14	Penguatan Mekanisme Pemulihan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

- b. **14%** komitmen atau sejumlah **2** komitmen menunjukkan proses ko-kreasi semi-aktif, yang menunjukkan baik K/L maupun OMS belum sepenuhnya berkolaborasi secara optimal. 2 komitmen tersebut antara lain, yakni:

Tabel 6.
Daftar Komitmen dengan Nilai Proses Ko-Kreasi Semi-Aktif

Nomor Komitmen	Judul Komitmen
Komitmen 4	Mengawal Perumusan Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

Komitmen 5	Penyusunan Mekanisme Penanganan Pemilu dan Disinformasi
------------	---

- c. **22%** komitmen atau sejumlah **3** komitmen menunjukkan proses ko-kreasi yang pasif, yang menunjukkan baik K/L maupun OMS belum berkolaborasi secara bermakna. **3** komitmen tersebut yakni:

Tabel 7.

Komitmen dengan Nilai Proses Ko-Kreasi Pasif

Nomor Komitmen	Judul Komitmen
Komitmen 6	Keterbukaan Tata Kelola Data Pemilihan Umum
Komitmen 8	Akuntabilitas Sosial Keterbukaan Anggaran Desa
Komitmen 15	Pengembangan Sistem Satu Data Sumber Daya Alam-Lingkungan Hidup (SDA-LH) yang Menjamin Keterbukaan Data dan Informasi Perizinan dan Tata Ruang

CATATAN UMUM DAN TINDAK LANJUT RAN OGI VII 2023-2024: SEMESTER III

Berikut poin-poin refleksi dan rekomendasi tindak lanjut yang didapatkan selama pelaksanaan RAN OGI VII 2023-2024 pada Semester I hingga Semester III, antara lain:

1. Peningkatan ko-kreasi antar aktor Pemerintah dan Non-Pemerintah

Pada semester III, nilai ko-kreasi mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian ko-kreasi pada semester I dan II. Hal ini juga berdampak pada pelaksanaan target capaian yang telah ditetapkan, karena target tidak dapat dicapai secara sempurna jika para aktor tidak saling bekerja sama. Kedepannya, proses ko-kreasi antar aktor perlu ditingkatkan dalam melaksanakan target capaian yang telah ditetapkan. Ko-kreasi yang dilakukan dapat berbentuk diskusi bersama antar pemangku kepentingan, pemberian masukan atau catatan kebijakan, dan komunikasi berkala untuk mendukung pencapaian pelaksanaan target capaian. Sekretariat Nasional OGI juga akan memfasilitasi diskusi rutin untuk membahas komitmen, terutama komitmen-komitmen yang masih mengalami tantangan ko-kreasi.

2. Penunjukkan Penanggung Jawab (PIC) untuk implementasi komitmen dan koordinasi berkala antar PIC Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)

Salah satu kendala yang dilaporkan dalam pencapaian target dan ko-kreasi adalah pergantian PIC untuk komitmen atau tidak adanya perwakilan yang ditugaskan sebagai PIC untuk implementasi komitmen. Peran PIC menjadi penting untuk memastikan koordinasi antar pemangku kepentingan dapat berjalan lancar untuk mengetahui dukungan yang dibutuhkan dan kendala yang dihadapi dalam menjalankan setiap komitmen. Koordinasi antar PIC Kementerian/Lembaga dan OMS pelaksana komitmen juga penting untuk melakukan ko-kreasi dan memastikan masing-masing pihak mendapatkan informasi berkala mengenai capaian komitmen. Bila hendak dilakukan perubahan PIC, perubahan tersebut dapat disertai dengan *knowledge transfer* kepada PIC baru.

3. Rendahnya jumlah stakeholders dalam melaporkan data dukung

Pada Monev Semester 3 (B18) RAN OGI VII Tahun 2024, terdapat tantangan yaitu rendahnya jumlah pemangku kepentingan yang mengumpulkan data dukung. Sekretariat Nasional OGI perlu untuk lebih aktif mendorong pemangku kepentingan untuk mengumpulkan data dukung, sehingga gambaran hasil pelaksanaan semester berjalan dapat dilihat dengan baik.

MEKANISME PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI, DAN PENYUSUNAN LAPORAN

MEKANISME PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA DUKUNG RAN OGI VII 2023-2024

Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) merupakan dua pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan RAN OGI secara ko-kreasi. Dalam pelaksanaan RAN OGI VII 2023-2024, terdapat 21 Kementerian/Lembaga dan 18 OMS yang memiliki sejumlah target capaian yang perlu untuk dilaksanakan dan dilaporkan setiap semesternya kepada Sekretariat Nasional OGI.

Pelaporan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan OMS diharapkan selaras dengan ukuran keberhasilan serta target capaian yang telah ditetapkan dalam dokumen RAN OGI VII 2023-2024. Lebih dari itu, diharapkan, dalam pelaksanaan komitmen-komitmen tersebut, Pemerintah bersama dengan OMS dapat mengerjakannya dengan mengedepankan proses ko-kreasi, sebagai bentuk kolaborasi antara Pemerintah dengan Organisasi Masyarakat Sipil.

Memasuki periode pelaporan, Pemerintah dan OMS akan memberikan Data Dukung terkait pelaksanaan komitmen melalui dua kanal yang berbeda, yaitu:

1. SISMONEV Kantor Staf Presiden - bagi Kementerian/Lembaga
2. SISMONEV OGI - bagi OMS

MEKANISME PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN RAN OGI VII 2023-2024

Dalam suatu proses pelaksanaan kebijakan, Monitoring dan Evaluasi merupakan salah satu dari proses tersebut yang perlu menjadi perhatian. Sekretariat Nasional OGI, sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan keberjalanan implementasi, memiliki tugas untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi RAN OGI VII 2023-2024. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan waktu Target Capaian, yaitu Semester I (B06), Semester II (B12), Semester III (B18), dan Semester IV (B24). Hingga dokumen ini diterbitkan, Sekretariat Nasional OGI telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi bagi Target Capaian Semester I, Semester II, dan Semester III. Adapun penjelasan terkait kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan akan dijelaskan pada bagian berikut.

1. Pemantauan (*Monitoring*)

Sekretariat OGI bertugas untuk melaksanakan pemantauan (monitoring) secara intensif pada akhir semester berjalan dengan cara:

- a. Mempelajari laporan data dukung capaian target semester Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil;
- b. Melakukan konfirmasi apabila dinilai terdapat data dukung maupun hal-hal lainnya yang kurang jelas atau perlu dilengkapi oleh Kementerian Lembaga/ Organisasi Masyarakat Sipil.

Mekanisme pemantauan akan dijalankan oleh Sekretariat OGI sepanjang waktu target capaian berjalan, hingga pada periode monitoring dan evaluasi RAN OGI VII 2023-2024 setiap semesternya.

2. Evaluasi

Sekretariat Nasional OGI melaksanakan evaluasi terhadap capaian target yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil. Dalam memberikan penilaiannya, Sekretariat Nasional OGI tidak hanya melakukan penilaian secara administratif, tetapi juga kualitas pelaksanaan yang meliputi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Memastikan rencana aksi yang dilaporkan memang telah dilaksanakan oleh pemerintah dan nonpemerintah secara ko-kreasi;
- b. Memastikan rencana aksi dilaksanakan dengan kualitas yang baik;
- c. Memastikan rencana aksi akan berkesinambungan;
- d. Memastikan para pelaksana menyadari bahwa rencana aksi membawa perubahan (*output-outcome*);
- e. Memastikan rencana aksi telah mencapai perubahan (*dampak/impact*) tidak hanya bagi pelaksana tapi juga penerima manfaat (masyarakat luas).

Selain itu, Sekretariat Nasional OGI melakukan analisis yang terdiri atas beberapa hal sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi capaian target, termasuk hambatan yang dialami oleh masing-masing komitmen, mulai dari Ukuran Keberhasilan, hingga Target Capaian masing-masing semester;
- b. Melakukan identifikasi Ko-kreasi serta Target Semester yang belum terselesaikan. Sekretariat OGI akan menganalisis kegiatan ko-kreasi yang dilakukan masing-masing pelaksana, serta meninjau kembali pelaksanaan target capaian yang tidak dapat diselesaikan pada periode sebelumnya

Proses Monitoring dan Evaluasi RAN OGI VII 2023-2024 dilaksanakan Sekretariat Nasional OGI dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Penilaian Capaian Administratif

Salah satu komponen penilaian yang dilakukan oleh Sekretariat OGI ialah penilaian Capaian Administratif. Penilaian ini bermakna untuk mengukur hasil kinerja Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil dalam melaksanakan target capaian di dalam komitmen. Adapun kriteria penilaian pada bagian ini terdiri atas beberapa hal sebagai berikut:

Tabel 8.
Skala Penilaian Capaian Administratif

Skala Nilai	Keterangan
70-100	Baik
51-69	Cukup
0-50	Kurang
N/A	<i>Not Available*</i>

*Target tidak dapat diukur pelaksanaannya karena membutuhkan dukungan dari pelaksana lainnya

b. Penilaian Proses Ko-kreasi

Sebagai salah satu mandat dalam pelaksanaan RAN, Sekretariat OGI menjadikan Proses Ko-kreasi sebagai salah satu komponen penilaian. Komponen ini menjelaskan sejauh mana ko-kreasi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dengan Organisasi

Masyarakat Sipil dalam melaksanakan komitmen RAN OGI. Adapun kriteria penilaian proses ko-kreasi sebagai berikut:

Tabel 9.

Skala Penilaian Proses Ko-kreasi

	Aktif
	Semi-Aktif
	Pasif
	(N/A) Tidak bisa dilaksanakan, karena bergantung pada pelaksana lainnya

c. Penyusunan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi

Penyusunan laporan yang dilakukan oleh Sekretariat Nasional OGI setiap akhir semester memberikan penekanan maupun sorotan baik secara kualitatif dan kuantitatif terhadap dua hal, yakni:

- 1) Capaian Administratif;
- 2) Proses Ko-kreasi.

Selain itu, laporan Monitoring dan Evaluasi juga mengandung bagian refleksi implementasi dan rekomendasi tindak lanjut B24 sebagai acuan bagi pelaksana RAN.

DESKRIPSI CAPAIAN 15 KOMITMEN RAN OGI VII 2023-2024

Komitmen 1

Mendorong Transparansi dan Partisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Ukuran Keberhasilan 1:		
Publikasi Transaksi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di e-katalog		
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)		
Target B06: Dilaksanakannya rapat yang membahas komponen informasi transaksi e-katalog yang akan dipublikasi bersama dengan masyarakat sipil	Capaian Target: Rapat telah mendiskusikan terkait keterbukaan publikasi komponen informasi transaksi e-katalog antara lain berupa informasi perkembangan penayangan produk, komposisi jumlah produk berdasarkan jenis, detail transaksi e-purchasing dan unduhannya. Diskusi telah dilaksanakan di beberapa unit kerja pengadaan barang/jasa di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, juga bersama dengan masyarakat sipil, yakni ICW.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Secara keseluruhan, LKPP dan OMS telah menjalin ko-kreasi dan komunikasi yang baik, diskusi dengan masyarakat sipil dilaksanakan pada 15 Agustus 2023 setelah periode Monev B06 dan data dukung disampaikan melalui mekanisme pelengkapan laporan.	Aktif
Target B12: Mempublikasi komponen informasi transaksi e-katalog	Capaian Target: LKPP telah mempublikasikan komponen informasi transaksi e-katalog berdasarkan hasil rapat pembahasan. Detail jenis laporan telah disampaikan dalam data dukung.	Nilai: 100%

berdasarkan hasil rapat pembahasan	Proses Ko-kreasi: LKPP telah menghadiri pembahasan mengenai RUU PBJ yang diselenggarakan OMS dalam rangka pencapaian ukuran keberhasilan ini.	Aktif
Target B18: Mempublikasi komponen informasi transaksi e-katalog berdasarkan hasil rapat pembahasan	Capaian Target: LKPP telah mempublikasikan filter K/L/OD yang didapati dari masukan Organisasi Masyarakat Sipil. Selain itu komponen informasi lainnya yang ditambahkan juga telah diluncurkan dalam Katalog Versi 6 ini.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: LKPP bersama dengan ICW telah melakukan Ko-kreasi dalam hal mempublikasikan komponen informasi transaksi e-katalog. Ko-kreasi dilakukan dengan diberinya ruang partisipasi publik bagi ICW untuk memberikan poin-poin informasi yang perlu dimasukkan.	Aktif
Indonesia Corruption Watch (ICW) & Transparency International Indonesia (TII)		
Target B06: Adanya diskusi untuk menyepakati komponen informasi transaksi yang harus dipublikasi K/L/PD di ekatalog	Capaian Target: OMS telah melaksanakan diskusi dengan LKPP terkait Revisi Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa yang membahas mengenai risiko korupsi e-procurement, Daftar Inventaris Masalah (DIM) pengadaan versi masyarakat sipil, dan strategi advokasi kedepannya. Salah satu aspek dalam DIM RUU PBJ mencakup pengadaan darurat. OMS juga telah menuliskan dokumen yang berisikan argumentasi dan rekomendasi terhadap pengembangan sistem-sistem PBJ ke depannya. Namun, pembahasan penyepakatan komponen transaksi yang perlu dipublikasi K/L/PD di dalam e-katalog belum menjadi fokus pada diskusi tersebut.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Ko-kreasi OMS dengan LKPP secara keseluruhan dinilai baik, walaupun untuk	Aktif

	Ukuran Keberhasilan 1 di B06 ini belum ada ko-kreasi dalam mencapai target penyepakatan komponen informasi transaksi yang harus dipublikasi K/L/PD di e-katalog.	
Target B12: Penyerahan komponen informasi transaksi yang harus dipublikasi K/L/PD	Capaian Target: Publikasi informasi sudah dilakukan oleh K/L/PD. Namun, untuk periode berikutnya, perlu ada evaluasi kembali dan perbaikan kualitas informasi yang dipublikasikan.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: OMS telah menyelenggarakan pembahasan mengenai RUU PBJ yang dihadiri oleh LKPP dalam rangka pencapaian ukuran keberhasilan ini.	Aktif
Target B18: Tidak ada target	Capaian Target: Tidak ada target	Nilai: Tidak ada target
	Proses Ko-kreasi: Tidak ada target	Tidak ada target
Ukuran Keberhasilan 2: Publikasi secara rinci informasi pengadaan darurat		
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)		
Target B06: Pembahasan terkait komponen informasi PBJ darurat yang akan ditambahkan dalam dashboard LPSE dengan melibatkan masyarakat sipil	Capaian Target: Pengembangan dashboard pengadaan darurat saat ini sudah ada pada SPSE 4.5. Rapat koordinasi telah terlaksana antara Direktorat Sistem Pengadaan Digital, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, dan Biro Perencanaan dan Keuangan LKPP dengan Indonesia Corruption Watch dalam membahas komponen informasi PBJ darurat yang akan ditambahkan dalam dashboard LPSE.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi:	Aktif

	Kegiatan pembahasan komponen informasi PBJ darurat dalam rapat koordinasi dilaksanakan secara ko-kreasi.	
Target B12: Penyesuaian informasi PBJ darurat yang akan ditambahkan pada LPSE	Capaian Target: LKPP telah menerima rekomendasi terkait informasi PBJ darurat yang dapat ditampilkan. Selain itu, LKPP sedang melakukan revisi mengenai Peraturan Lembaga Nomor 13 Tahun 2013 dan uji publik dalam rangka penyusunan inventarisasi masalah Peraturan Lembaga tersebut dengan pelibatan organisasi masyarakat sipil (ICW).	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: LKPP dan OMS telah melakukan pembahasan aktif mengenai penyesuaian informasi PBJ darurat yang akan ditambahkan pada LPSE.	Aktif
Target B18: Penyesuaian informasi PBJ darurat yang akan ditambahkan pada LPSE	Capaian Target: LKPP telah menerima masukan dari OMS terkait informasi yang perlu disediakan dalam PBJ darurat. Penyesuaian perlu disegerakan sebelum mencapai B24.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: LKPP telah melaksanakan ko-kreasi aktif dengan ICW untuk menerima masukan-masukan terkait komponen informasi yang perlu ditambahkan dalam PBJ darurat	Aktif
Indonesia Corruption Watch (ICW) & Transparency International Indonesia (TII)		
Target B06: Pembahasan terkait komponen informasi PBJ darurat yang akan ditambahkan dalam dashboard LPSE dengan	Capaian Target: TII telah melaksanakan diskusi dengan LKPP terkait Revisi Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa yang membahas mengenai risiko korupsi e-procurement, Daftar Inventaris Masalah (DIM) pengadaan versi masyarakat sipil, dan strategi advokasi kedepannya. Salah satu aspek dalam DIM RUU PBJ mencakup pengadaan darurat. ICW telah terlibat dalam	Nilai:100%

melibatkan masyarakat sipil	diskusi mengenai informasi yang perlu dipublikasi dalam kanal PBJ darurat. Kelengkapan informasi dari sisi realisasi dibutuhkan untuk pengembangan dashboard pengadaan darurat. ICW akan menyusun kajian/rekomendasi terkait informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan pengadaan darurat.	
	Proses Ko-kreasi: Ko-kreasi telah dilaksanakan antara OMS dengan LKPP melalui penyelenggaraan diskusi dan rapat koordinasi.	Aktif
Target B12: Penyerahan komponen informasi yang perlu dipublikasi dalam kanal PBJ darurat	Capaian Target: ICW telah menyerahkan catatan atas pengadaan darurat, termasuk mengenai keterbukaan informasi dan komponen informasi yang dibutuhkan dalam Pengadaan Darurat di SPBE.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: LKPP dan OMS telah melakukan pembahasan aktif mengenai penyesuaian informasi PBJ darurat yang akan ditambahkan pada LPSE. Salah satu kegiatan pembahasan yang diselenggarakan antara lain FGD pada 14 September.	Aktif
Target B18: Tidak ada target	Capaian Target: Tidak ada target	Nilai: Tidak ada Target
	Proses Ko-kreasi: Tidak ada target	Tidak ada target
Ukuran Keberhasilan 3: Mendorong efektivitas kanal e-pengaduan dalam menangani pengaduan masyarakat		
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)		
Target B06:	Capaian Target:	Nilai: 100%

Persiapan integrasi inspektorat K/L/PD di dalam sistem e-pengaduan	Sampai dengan 31 Mei 2023, terdapat 83 Inspektorat K/L/PD yang telah bergabung dalam sistem e-pengaduan. Akan tetapi, pada April 2023 terdapat insiden keamanan informasi pada sistem e-pengaduan yang kemudian dilakukan pembahasan kendala antara Pusdatin LKPP, Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum LKPP, dan BSSN. Akibat adanya insiden tersebut, alternatif penyampaian pengaduan hingga saat ini masih dilakukan melalui persuratan lewat e-office LKPP.	
	Proses Ko-kreasi: Ko-kreasi tidak dapat dinilai dikarenakan OMS tidak memiliki capaian target untuk B06 pada Ukuran Keberhasilan 3 ini.	N/A
Target B12: Melibatkan partisipasi inspektorat K/L/PD ke sistem e-pengaduan	Capaian Target: LKPP telah memberikan pelatihan dan piloting terkait dengan pengembangan e-pengaduan kepada 120 inspektorat di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: LKPP dan ICW telah melakukan beberapa pertemuan untuk membahas implementasi target ini, antara lain pada tanggal 9, 21, 24, dan 28 November 2023.	Aktif
Target B18: Menambah keterlibatan partisipasi inspektorat pada sistem e-pengaduan	Capaian Target: Pelibatan Peran APIP dalam pemanfaatan sistem Monitoring dalam PBJP sudah dilaksanakan. Telah dilakukan sosialisasi kepada K/L/PD. Dalam meningkatkan keterlibatan peran APIP, juga perlu dilaksanakan kegiatan pelatihan atau pengukuran terkait dengann efektivitas peran APIP untuk kedepannya.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi:	Aktif

	LKPP dan ICW telah melaksanakan Ko-kreasi terkait dengan peningkatan partisipasi inspektorat	
Indonesia Corruption Watch (ICW)		
Target B06: Tidak ada target B06	Capaian Target: Tidak ada target	Nilai: Tidak ada target
	Proses Ko-kreasi: Tidak ada target	Tidak ada target
Target B12: Pendampingan integrasi inspektorat K/L/PD di dalam sistem e-pengaduan	Capaian Target: ICW telah terlibat dalam proses pendampingan integrasi, terutama untuk perbaikan platform e-pengaduan agar integrasi dapat terlaksana dan untuk meningkatkan kualitas platform tersebut secara umum.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: LKPP dan ICW telah melakukan beberapa pertemuan untuk membahas implementasi target ini, antara lain pada tanggal 9, 21, 24, dan 28 November 2023.	Aktif
Target B18: Pendampingan integrasi inspektorat K/L/PD di dalam sistem e-pengaduan	Capaian Target: ICW telah melakukan diskusi terkait integrasi E-Pengaduan dengan Opentender.net. Selanjutnya proses yang akan dilakukan adalah integrasi API.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Proses Ko-kreasi telah dilakukan antara ICW dengan LKPP melalui berbagi API untuk diintegrasikan dengan portal Opentender.net yang dibangun oleh ICW	Aktif
Ukuran Keberhasilan 4: Pengembangan database Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) yang terintegrasi dan terbuka		
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)		

Target B06: Pembahasan terkait data kinerja penyedia yang akan dipublikasi di SIKAP dengan melibatkan OMS	Capaian Target: Telah dilakukan rapat pembahasan antara LKPP dan ICW pada 7 Juni 2023 yang membahas mengenai data kinerja penyedia yang akan dipublikasi di SIKaP. Publikasi komponen di SIKAP saat ini sudah terhubung dengan data Beneficial Ownership di Website BO.AHU.go.id, harapannya akan dapat ditampilkan riwayat penyedia yang memiliki daftar hitam/blacklist untuk pengadaan dan riwayat pekerjaan. Nama penyedia dan riwayat kemenangan tender menjadi salah satu data kinerja penyedia yang saat ini dapat dilihat publik tanpa perlu login. Apabila login dengan akun ppk akan dapat terlihat pula nilai yang diberikan terhadap penyedia.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Pembahasan data kinerja penyedia yang akan dipublikasi di SIKAP dilakukan secara ko-kreasi dengan mengundang OMS untuk mengidentifikasi komponen yang harus dipublikasi beserta alasan kepentingannya.	Aktif
Target B12: Persiapan integrasi data SIKAP dengan data Beneficial Ownership Kementerian Hukum dan HAM	Capaian Target: Kemenkumham dan LKPP telah menandatangani perjanjian kerja sama. Harapannya kedepan dapat diteruskan segera untuk pemanfaatan data BO kepada sistem pengadaan barang dan jasa.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Karena target capaian ini berkaitan dengan data BO dan kolaborasi antara LKPP dan Kementerian Hukum dan HAM, tidak ada ko-kreasi yang dijalankan untuk capaian ini.	Aktif
Target B18: Integrasi data SIKAP dengan BO Kemenkumham	Capaian Target: LKPP dan Kemenkumham (Ditjen AHU) telah memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait dengan Pemanfaatan Data BO untuk Badan Usaha. Namun, terkait dengan persiapan	Nilai: 100%

	integrasi Data BO dengan Kemenkumham perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut, karena terkait dengan waktu integrasi belum dapat tercerminkan dalam kegiatan yang ada saat ini.	
	Proses Ko-kreasi: Integrasi data BO perlu untuk segera dilakukan oleh LKPP dan juga data BO dapat dimanfaatkan sebagai penapis dalam PBJP. Integrasi diharapkan juga dapat melibatkan OMS	Aktif
Indonesia Corruption Watch (ICW)		
Target B06: Koordinasi dengan LKPP mengenai data kinerja penyedia yang akan terpublikasi di SIKAP.	Capaian Target: Koordinasi telah dilakukan untuk penyediaan data kinerja penyedia di SIKAP melalui rapat pembahasan di tanggal 7 Juni 2023. Beberapa hal yang menjadi review dari ICW mencakup data paket pekerjaan yang dimenangkan, data pelanggaran blacklist, nilai rupiah dan jumlah paket yang dimenangkan per tahun.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Ko-kreasi dilaksanakan melalui keterlibatan ICW dalam rapat koordinasi yang diundang oleh LKPP.	Aktif
Target B12: Koordinasi dengan LKPP mengenai pengembangan database SIKAP yang terintegrasi	Capaian Target: ICW telah membuat kajian yang terdiri dari beberapa muatan, antara lain telaah Komponen Informasi untuk SIKAP. Kajian tersebut sudah disampaikan ke LKPP melalui audiensi.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: ICW dan LKPP telah melakukan ko-kreasi untuk komponen informasi database SIKAP.	Aktif
Target B18: Terlaksananya forum diskusi kedua dengan	Capaian Target: ICW telah melaksanakan diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk	Nilai: 100%

melibatkan pemerintah, sektor privat, dan masyarakat sipil	LKPP. Dalam diskusi ini ICW memberikan informasi terkait dengan praktik-praktik baik pelaksanaan sistem informasi sejenis dengan SIKAP di negara lain.	
	Proses Ko-kreasi: ICW telah mendorong pelaksanaan ko-kreasi antara ICW dengan LKPP untuk mendorong pengembangan SIKAP.	Aktif
Ukuran Keberhasilan 5: Publikasi informasi atau dokumen Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang diatur dalam Perki No. 1 Tahun 2021 di SPSE sesuai dengan kewenangan LKPP		
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)		
Target B06: 1. Pembahasan terkait informasi yang wajib dibuka sesuai Perki No. 1 Tahun 2021 yang berada di bawah kewenangan LKPP dengan melibatkan OMS 2. Pembahasan mekanisme/bentuk kode unik untuk menyatukan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dalam satu objek program yang sama	Capaian Target: Telah dilaksanakan rapat yang membahas mengenai mekanisme/bentuk kode unik untuk menyatukan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dalam satu objek program yang sama. Terkait mekanisme/bentuk kode unik yang menyatukan pekerjaan-pekerjaan yang dalam satu objek program yang sama, kegiatan yang telah dilakukan oleh LKPP meliputi analisa belanja pemerintah dengan menggunakan kode unik berdasarkan kinerja realisasi PBJ K/L dan Pemda bukan kinerja perencanaan. Kode unik sedang tahap pengembangan oleh Direktorat Sistem Pengadaan Digital dan Direktorat Pasar Digital Pengadaan. Terkait informasi yang wajib dibuka sesuai Perki SLIP, pada Februari lalu LKPP telah menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) namun jangka waktu beberapa dokumen DIK ada yang terlalu lama sehingga akan dimutakhirkan.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Proses ko-kreasi telah dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi yang memiliki muatan bahasan mengenai DIP & DIK serta	Aktif

	pembahasan kode unik untuk menyatukan pekerjaan dalam proses pengadaan.	
Target B12: 1. Persiapan fitur publikasi yang mengakomodir komponen informasi PBJ berdasarkan hasil kesepakatan 2. Persiapan pengembangan kode unik berdasarkan hasil kesepakatan	Capaian Target: 1. OMS (ICW) telah mengirimkan rekomendasi terkait apa saja yang perlu ditampilkan terkait informasi SPSE. 2. Telah dilakukan diskusi di internal LKPP terkait kebutuhan pengembangan kode unik dikembangkan di SPSE. Saat ini di aplikasi SIRUP telah terdapat data dan informasi terkait kebutuhan pengadaan melalui RUP. Telah dilakukan publikasi informasi melalui siaran pers dan berita pada website LKPP.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Proses Ko-kreasi telah dilakukan oleh ICW dan LKPP secara aktif.	Aktif
Target B18: 1. Pengembangan fitur publikasi yang mengakomodir komponen informasi PBJ berdasarkan hasil kesepakatan. 2. Pengembangan kode unik berdasarkan hasil kesepakatan	Capaian Target: Pengembangan fitur telah dilakukan oleh LKPP terkait dengan informasi-informasi yang perlu disediakan dalam Sistem Informasi PBJ. Namun pembahasan terkait dengan kode unik perlu untuk segera ditindaklanjuti oleh LKPP bersama dengan ICW.	
	Proses Ko-kreasi: Proses Ko-kreasi telah dilakukan oleh LKPP bersama dengan ICW, melalui pemberian masukan-masukan terkait dengan pengembangan fitur informasi dalam PBJP.	Aktif
Indonesia Corruption Watch (ICW)		
Target B06: 1. Adanya diskusi untuk menyepakati informasi yang wajib dibuka sesuai Perki	Capaian Target: Diskusi telah dilaksanakan pada Juni 2023 sebagai bentuk awalan pembahasan mengenai daftar informasi publik yang dibuka, akan tetapi belum ada kesepakatan informasi apa yang	Nilai: 100%

<p>No. 1 Tahun 2021 yang berada di bawah kewenangan LKPP</p> <p>2. Adanya diskusi terkait mekanisme/bentuk kode unik untuk menyatukan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dalam satu objek program yang sama</p>	<p>akan dibuka sesuai Perki SLIP. Hal ini akan dikaji lebih lanjut oleh ICW. Pembahasan mengenai mekanisme dan bentuk kode unik juga menjadi salah satu poin diskusi yang usulannya akan diberikan pula argumentasi dan manfaatnya.</p>	
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>Ko-kreasi telah dilaksanakan melalui rapat koordinasi yang melibatkan ICW dan LKPP.</p>	Aktif
<p>Target B12:</p> <p>1. Koordinasi publikasi informasi sesuai dengan kesepakatan diskusi</p> <p>2. Koordinasi dengan LKPP terkait pengembangan kode unik untuk menyatukan pekerjaan-pekerjaan terkait dalam satu objek program yang sama</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>ICW telah mengirimkan kajian yang berisi rekomendasi terkait apa saja yang perlu ditampilkan terkait informasi SPSE. ICW juga telah memberikan masukan mengenai Kode Unik Proyek.</p>	Nilai: 100%
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>ICW telah menyampaikan hasil kajian kepada LKPP dalam sebuah audiensi. Hasil kajian tersebut juga sedang ditindaklanjuti oleh LKPP dalam diskusi internal, sehingga ko-kreasi dinilai aktif.</p>	Aktif

Target B18: Koordinasi dengan LKPP terkait pengembangan kode unik untuk menyatukan pekerjaan-pekerjaan terkait dalam satu objek program yang sama	Capaian Target: ICW telah berinisiatif untuk mengirimkan kode unik untuk menyatukan pekerjaan pekerjaan terkait dalam satu objek program yang sama. Namun pembahasan dan koordinasi lebih lanjut belum dilaksanakan. Perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut bersama antara LKPP dan ICW untuk menyelesaikan target tersebut	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Proses Ko-kreasi telah dilaksanakan dengan baik. Namun pembahasan dan koordinasi terkait dengan kode unik yang menyatukan pekerjaan-pekerjaan terkait dalam satu objek program yang sama perlu untuk segera dilaksanakan	Aktif
Ukuran Keberhasilan 6: Penguatan masyarakat dalam keterlibatan dan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)		
Target B06: Pembahasan MOU antara LKPP dengan OMS	Capaian Target: Telah dilaksanakan penandatanganan MoU antara LKPP dengan ICW dan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) dalam kegiatan Open Government Week 2023. Salah satu kegiatan yang akan didorong adalah peningkatan kompetensi kepada masyarakat tentang pengawasan Pengadaan Barang/Jasa bekerja sama dengan ICW dan TII.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Pembahasan substansi MoU dan penandatanganan MoU dilaksanakan dengan ko-kreasi antara LKPP, ICW, dan IAPI.	Aktif
Target B12: 1. Tersedianya MOU antara LKPP dengan OMS	Capaian Target: 1. Telah terdapat MoU antara LKPP dengan ICW terkait dengan pengawasan pengadaan barang/jasa.	Nilai: 100%

berdasarkan pembahasan yang telah dilaksanakan sebelumnya 2. Keterlibatan dalam peningkatan kompetensi terkait pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah	2. Telah diselenggarakan peningkatan kompetensi terkait pengawasan PBJ, antara lain oleh Pusat SDM PBJ dalam rangka penguatan partisipasi dan peran UMKK, Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional untuk kegiatan peningkatan kapasitas pelaku usaha, dan Direktorat Penanganan Permasalahan terkait kasus PBJ Pemerintah.	
	Proses Ko-kreasi: Sudah ada MoU antara LKPP dan OMS	Aktif
Target B18: Keterlibatan dalam peningkatan kompetensi terkait pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah	Capaian Target: LKPP telah melakukan FGD dengan OMS serta memberikan materi dan peningkatan kompetensi bersama dengan berbagai pemangku kepentingan	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: LKPP telah melakukan ko-kreasi bersama dengan berbagai unsur OMS untuk meningkatkan pengawasan PBJP	Aktif
Indonesia Corruption Watch (ICW)		
Target B06: Pembahasan MoU antara LKPP dengan OMS	Capaian Target: Telah dilaksanakan penandatanganan MoU antara LKPP dengan ICW dan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) dalam kegiatan Open Government Week 2023. Salah satu kegiatan yang akan didorong adalah peningkatan kompetensi kepada masyarakat tentang pengawasan Pengadaan Barang/Jasa bekerja sama dengan ICW dan TII.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Pembahasan substansi MoU dan penandatanganan MoU dilaksanakan dengan ko-kreasi antara LKPP, ICW, dan IAPI.	Aktif

Target B12: Penyelenggaraan peningkatan kompetensi terkait pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah	Capaian Target: Telah diselenggarakan pelatihan PBJ untuk CSO di Maros, CSO di Kupang, dan Sekolah Antikorupsi Pemuda	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: LKPP terlibat sebagai narasumber di pelatihan yang diselenggarakan ICW	Aktif
Target B18: 1. Menyelenggarakan peningkatan kompetensi terkait pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah 2. Penyusunan modul pengaduan barang/jasa bagi organisasi masyarakat sipil	Capaian Target: 1. ICW telah melakukan pelatihan terkait dengan PBJP yang berkaitan dengan modul Keterbukaan Informasi Publik dan Metode Investigasi TIPIKOR. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk workshop untuk memastikan peserta memahami dan mengalami secara langsung pengawasan terkait dengan PBJP 2. Modul telah disusun oleh ICW serta dapat diakses oleh Publik. Modul ini bermanfaat untuk melakukan tindakan Korupsi di sektor PBJP	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: ICW dan LKPP telah melakukan pelatihan untuk meningkatkan pengawasan PBJP. Lebih dari itu ICW juga telah menyusun Modul PBJP	Aktif
Ukuran Keberhasilan 7: Implementasi informasi PBJ Pemerintah menurut Perki 1/2021		
KIP		
Target B06: Review Indikator Pengadaan Barang/Jasa untuk Monev Keterbukaan Informasi Publik yang melibatkan	Capaian Target: Telah dilaksanakan FGD yang mengundang OMS pada Februari 2023 terkait evaluasi terhadap pelaksanaan Monev KIP, namun diskusi belum sepenuhnya membahas mengenai evaluasi terhadap indikator di Monev Keterbukaan Informasi Publik khususnya di	Nilai: 80%

masyarakat sipil	pengadaan barang dan jasa.	
	Proses Ko-kreasi: Ko-kreasi telah dilaksanakan dengan mengundang OMS pada FGD untuk evaluasi terkait pelaksanaan monev. Akan tetapi, monev dan indikatornya saat ini sudah diedarkan dan tidak bisa diubah sehingga pembahasan mengenai indikator pengadaan barang/jasa di monev keterbukaan informasi publik belum sepenuhnya melibatkan masyarakat sipil.	Semi-Aktif
Target B12: Publikasi Kuesioner Indikator Penilaian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik	Capaian Target: KIP telah menyusun daftar pertanyaan terkait dengan kuesioner Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Kuesioner juga dapat dilihat di sistem E-Monev KIP (https://e-monev.komisiinformasi.go.id/)	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Dokumen kuesioner telah disusun bersama dengan OMS dan telah dibuka kepada OMS secara terbatas.	Aktif
Target B18: Keterlibatan di dalam FGD terkait Review Implementasi Monev Keterbukaan Informasi Publik terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Capaian Target: Tidak Melaporkan Data Dukung	Nilai: N/A
	Proses Ko-kreasi: Tidak Melaporkan Data Dukung	N/A
Indonesia Corruption Watch (ICW)		
Target B06: Review Indikator Pengadaan Barang/Jasa untuk Monev Keterbukaan	Capaian Target: Mengikuti FGD yang dilaksanakan oleh KIP untuk evaluasi terhadap pelaksanaan monev keterbukaan informasi publik pada Februari 2023.	Nilai: 100%

Informasi Publik yang melibatkan masyarakat sipil	Proses Ko-kreasi: Ko-kreasi telah dilaksanakan dengan mengundang berpartisipasi pada FGD untuk evaluasi terkait pelaksanaan monev. Akan tetapi, monev dan indikatornya saat ini sudah diedarkan dan tidak bisa diubah sehingga pembahasan mengenai indikator pengadaan barang/jasa di monev keterbukaan informasi publik belum sepenuhnya melibatkan masyarakat sipil.	Semi-Aktif
Target B12:	Capaian Target: -	Nilai: -
Tidak ada target	Proses Ko-kreasi: -	-
Target B18:	Capaian Target:	Nilai: 100%
FGD terkait Review Implementasi Monev Keterbukaan Informasi Publik terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	ICW bersama LKPP dan KIP telah melaksanakan FGD mengenai hasil evaluasi Perki SLIP. Dalam diskusi tersebut ICW telah memberikan masukan-masukan terkait pelaksanaan Perki SLIP sektor PBPJP yang perlu dikuatkan oleh KIP maupun LKPP.	
	Proses Ko-kreasi ICW bersama LKPP dan KIP telah melakukan proses ko-kreasi dengan aktif	Aktif
Tindak Lanjut B24: <ul style="list-style-type: none"> - KIP perlu untuk mengumpulkan data dukung untuk memperbaiki pelaksanaan target capaian B18 - Pelaksanaan Capaian Target B18 oleh LKPP dan ICW pada garis besar sudah berjalan dengan baik. Namun, dalam proses Ko-kreasi, ICW dan LKPP perlu menguatkan kembali terkait dengan informasi-informasi yang bisa dibagikan dan diserap sebagai masukan publik agar partisipasi publik dalam proses ko-kreasi ini menjadi bermakna dan kuat. 		

Komitmen 2

Optimalisasi Implementasi Keterbukaan Data Beneficial Ownership

Ukuran Keberhasilan:		
Peningkatan Kualitas Data Pemilik Manfaat/Beneficial Ownership		
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK)		
Target B06: Review Terhadap Regulasi, Standar, Struktur dan Kualitas Basis Data BO di Masing-Masing Institusi (Berdasarkan Perpres 13/2018)	Capaian Target: Telah dilakukan review terhadap regulasi, standar, dan struktur data BO oleh Stranas PK dengan Kementerian Hukum dan HAM yang sehubungan dengan pelaksanaan Revisi Perpres 13 Tahun 2018	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Dalam melakukan review telah melibatkan Organisasi Masyarakat Sipil (PWYP Indonesia, Auriga, dan TI Indonesia)	Aktif
Target B12: Review Terhadap Regulasi, Standar, Struktur dan Kualitas Basis Data BO di Masing-Masing Institusi (Berdasarkan Perpres 13/2018)	Capaian Target: Pelaksanaan review terhadap regulasi Perpres 13 Tahun 2018 telah dilakukan kembali dengan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dan penyempurnaan terhadap regulasi BO saat ini.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Kemenkumham dan Stranas PK dalam melakukan review telah melibatkan OMS (PWYP Indonesia, Auriga, dan TI Indonesia).	Aktif
Target B18: Tidak ada target	Capaian Target: Tidak ada target	Nilai: Tidak ada target
	Proses Ko-kreasi: Tidak ada target	Tidak ada target
Kantor Staf Presiden, PPATK, Kemenkumham		
Target B06: Laporan review Sectoral Risk	Capaian Target: Kementerian/Lembaga telah mengeluarkan Laporan Sectoral Risk Assessment Data BO	Nilai: 100%

Assessment (SRA) Data BO Pengumpulan Basis Data BO yang Terstandarisasi di Masing - Masing Institusi	Proses Ko-kreasi: Proses Ko-kreasi telah berjalan dengan baik antara KPK dengan Organisasi Masyarakat Sipil	Aktif
Target B12: Laporan review Sectoral Risk Assessment (SRA) Data BO Pengumpulan Basis Data BO yang Terstandarisasi di Masing - Masing Institusi	Capaian Target: Korporasi risiko tinggi teridentifikasi: 3.289 (Sektor Konstruksi: 1.050; Investasi dan Keuangan: 1.695; Pertambangan dan distribusi: 544; Sektor Perdagangan: belum teridentifikasi)	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Kegiatan telah melibatkan Organisasi Masyarakat Sipil (PWYP Indonesia, Auriga, dan TI Indonesia)	Aktif
Target B18: Pelaksanaan Proses Verifikasi	Capaian Target: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) belum melaksanakan verifikasi terkait dengan data BO. Saat ini sedang dilakukan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi, yang sedang dalam proses analisis untuk pengajuan penyetoran.	40%
	Proses Ko-kreasi: Ditjen AHU Kemenkumham telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan masyarakat sipil untuk menginformasikan draft revisi Permenkumham terkait Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi, tetapi masukan masyarakat sipil belum ada yang dapat diakomodir	Semi-Aktif
Kementerian ESDM, KLHK, Kementan, Kementerian ATR/BPN, KemenKOP dan UKM, Kemendag, Kemenkumham, Stranas -PK, BKPM, OJK, LKPP, Kemenkeu		
Target B06: Pengumpulan Basis Data BO	Capaian Target: Korporasi risiko tinggi teridentifikasi: 3.559 (Sektor Konstruksi: 1.050; Investasi dan Keuangan: 1.965;	Nilai: 100%

yang Terstandarisasi di Masing - Masing Institusi	Pertambangan dan distribusi: 544; Sektor Perdagangan: belum teridentifikasi) Pemadanan data telah dilakukan pada 883 data BO disektor konstruksi. Belum ada proses verifikasi	
	Proses Ko-kreasi: Kegiatan telah melibatkan Organisasi Masyarakat Sipil (PWYP Indonesia, Auriga, dan TI Indonesia)	Aktif
Target B12:	Capaian Target:	Nilai: 100%
Pengumpulan Basis Data BO yang Terstandarisasi di Masing - Masing Institusi	Korporasi risiko tinggi teridentifikasi: 3.289 (Sektor Konstruksi: 1.050; Investasi dan Keuangan: 1.695; Pertambangan dan distribusi: 544; Sektor Perdagangan: belum teridentifikasi)	
	Proses Ko-kreasi: telah melibatkan Organisasi Masyarakat Sipil (PWYP Indonesia, Auriga, dan TI Indonesia)	Aktif
Target B18:	Capaian Target:	Nilai: 95.16%
Pengumpulan Basis Data BO yang Terstandarisasi di Masing-Masing Institusi	<ul style="list-style-type: none"> Sektor konstruksi: 921 dari 1.050 korporasi (88%) telah melaporkan data pemilik manfaat (BO). Sektor perdagangan, 57 dari 60 korporasi (95%) telah melaporkan data pemilik manfaat (BO). Sektor investasi keuangan: 1.660 dari 1.695 korporasi (98%) telah melaporkan data pemilik manfaat (BO). Sektor pertambangan, seluruh 1.323 korporasi (100%) telah melaporkan data pemilik manfaat (BO). 	
	Proses Ko-kreasi: Kemenkumham bekerjasama dengan berbagai pihak untuk turut berpartisipasi dalam melakukan deklarasi bagi perusahaan dengan sektor-sektor risiko tinggi	Aktif
PWYP, ICW, dan Transparency International Indonesia		
Target B06:	Capaian Target:	Nilai: 100%

<p>1. Keterlibatan CSO dalam Review Terhadap Regulasi, Standar, Struktur dan Kualitas Basis Data BO di Masing - Masing Institusi (Berdasarkan Perpres 13/2018)</p> <p>2. Penyusunan Kajian Kepatuhan Korporasi Dalam Deklarasi BO</p>	<p>Organisasi Masyarakat Sipil telah terlibat dalam diskusi pembahasan butir-butir revisi Permenkumham terkait tata cara Verifikasi Data BO. OMS juga telah membuat laporan atau kajian terkait data BO korporasi dalam lingkup perusahaan sawit di Indonesia</p>	
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>Proses Ko-kreasi telah berjalan dengan baik antara KPK dengan Organisasi Masyarakat Sipil</p>	Aktif
<p>Target B12:</p> <p>1. Keterlibatan CSO dalam Review Terhadap Regulasi, Standar, Struktur dan Kualitas Basis Data BO di Masing - Masing Institusi (Berdasarkan Perpres 13/2018)</p> <p>2. Keterlibatan CSO dalam Cleansing Data BO yang Tersedia (Baik AHU maupun Institusi Lain) Dengan Data Legal Owner, Data NIK, NPWP</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>PWYP telah terlibat dalam diskusi dan pelaksanaan cleansing data BO yang terdapat di Ditjen AHU dan K/L terkait lainnya</p>	Nilai: 100%
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>Telah ada diskusi antar K/L terkait dengan PWYP untuk implementasi target capaian B12.</p>	Aktif
Target B18:	Capaian Target:	Nilai:

Tidak ada target	Tidak ada target	Tidak ada target
	Proses Ko-kreasi: Tidak ada target	Tidak ada target
Tindak Lanjut B24: Kementerian Hukum dan HAM perlu untuk segera menyelesaikan Revisi Peraturan Menkumham terkait dengan mekanisme verifikasi dan mendorong pelibatan dan masukan masyarakat cara aktif.		

Komitmen 3

Perlindungan Hukum dalam Perkara Lingkungan Hidup

Ukuran Keberhasilan:		
Penyusunan Kajian Rekomendasi Kepastian Perlindungan Hukum Bagi Pembela Lingkungan		
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia		
Target B06	Capaian Target:	Nilai: 100%
1. Memberikan masukan atas data ancaman yang dialami oleh pembela lingkungan yang merupakan basis data penyusunan outline kajian	Pemberian masukan atas data ancaman telah dilakukan Komnas HAM pada B12	Aktif
2. FGD yang membahas mengenai ancaman yang dialami oleh pembela lingkungan	Proses Ko-kreasi: Komnas HAM telah melakukan Ko-kreasi dengan Auriga Nusantara dalam penyusunan kajian oleh Auriga Nusantara	
Target B12:	Capaian Target:	Nilai: 100%
Memberikan masukan atas data kejadian ancaman yang dialami oleh pembela lingkungan	Auriga telah menerima masukan dari Komnas HAM atas kajian yang disusun dan data yang dibutuhkan untuk melengkapi kajian, yakni data aduan Komnas HAM RI tahun 2023. Namun, Auriga masih membutuhkan data aduan tahun 2022 dari Komnas HAM untuk melengkapi kajian lebih lanjut.	Semi-aktif
	Proses Ko-kreasi: Berdasarkan data dukung yang telah dikumpulkan Auriga, Komnas HAM telah menghadiri beberapa pertemuan yang diselenggarakan oleh Auriga untuk membahas tindak lanjut mengenai data kejadian	

	ancaman yang dialami oleh pembela lingkungan. Namun, ko-kreasi dapat ditingkatkan agar ada kerja sama lebih bermakna antara kedua pihak.	
Target B18: Supervisi atas penyusunan draft kajian rekomendasi kepastian perlindungan hukum bagi pembela lingkungan	Capaian Target: Tidak ada laporan.	Nilai: N/A
	Proses Ko-kreasi: Tidak ada laporan.	N/A
Kepolisian Republik Indonesia		
Target B06: Menerima data mengenai peristiwa yang dianggap sebagai ancaman terhadap pembela lingkungan	Capaian Target: Kepolisian telah menerima data Auriga Nusantara mengenai peristiwa terkait ancaman terhadap pembela lingkungan dengan memberikan pula database dari tahun 2014 hingga April 2023 terdapat 107 kasus ancaman terhadap pembela lingkungan.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Kepolisian telah turut serta dalam menelaah data yang dihimpun Auriga dan memberikan rekap database yang kemudian menjadi basis data yang ditampilkan di dalam sesi diskusi ancaman terhadap pembela lingkungan pada OG Week 2023. Kepolisian juga telah melakukan inisiatif ko-kreasi dengan menjadi narasumber dalam sesi diskusi tersebut.	Aktif
Target B12: Menganalisa dan mengevaluasi perkara yang menjadikan ancaman	Capaian Target: Kepolisian RI sudah melakukan analisa pada B06, dan analisa tersebut masih cukup untuk menjadi masukan bagi Auriga di Semester II.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi:	Aktif

terhadap pembela lingkungan	Kepolisian telah melakukan Ko-kreasi secara aktif dengan Auriga Nusantara dan memberikan masukan terkait dengan pelaksanaan perkara ancaman terhadap pembela lingkungan	
Target B18: Keterlibatan dalam penyusunan draft kajian rekomendasi kepastian perlindungan hukum bagi pembela lingkungan	Capaian Target: Kepolisian RI telah memberikan masukan kepada Auriga Nusantara dan terlibat dalam penyusunan Draft Kajian Rekomendasi perlindungan hukum bagi pembela lingkungan yang sedang disusun oleh Auriga Nusantara	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Proses ko-kreasi telah dilakukan oleh Kepolisian RI melalui pemberian masukan terhadap kajian Yayasan Auriga Nusantara terkait Perlindungan Hukum bagi Pembela Lingkungan	Aktif
Auriga Nusantara		
Target B06 1. Tersedianya masukan mengenai data ancaman yang dialami oleh pembela lingkungan	Capaian Target: Auriga telah melakukan ko-kreasi dengan mengundang Kepolisian dan Komnas HAM terlibat sebagai narasumber dalam sesi diskusi kepastian perlindungan hukum bagi pembela lingkungan. Rapat koordinasi juga dilaksanakan beberapa kali antar keduanya dalam pembahasan database ancaman terhadap pembela lingkungan dan outline terkait kajian kepastian perlindungan hukum bagi pembela lingkungan.	Nilai: 100%
2. Keterlibatan dalam FGD dan penyusunan outline kajian kepastian perlindungan hukum bagi pembela lingkungan	Proses Ko-kreasi: Ko-kreasi telah dilaksanakan dengan pelibatan Kepolisian dan Komnas HAM dalam FGD yang diselenggarakan Auriga bersama Setnas OGI di OG Week 2023.	Aktif
Target B12:	Capaian Target:	Nilai: 100%

Tersedianya masukan mengenai data kejadian ancaman dan literatur pendukung kajian	Auriga telah menerima masukan dari Komnas HAM atas kajian yang disusun dan data yang dibutuhkan untuk melengkapi kajian, yakni data aduan Komnas HAM RI tahun 2023. Namun, Auriga masih membutuhkan data aduan tahun 2022 dari Komnas HAM untuk melengkapi kajian lebih lanjut.	
	Proses Ko-kreasi: Auriga telah menyelenggarakan beberapa pertemuan informal dengan Komnas HAM untuk mendapatkan masukan atas data. Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, Auriga akan mengadakan FGD resmi dengan berbagai pihak, termasuk Komnas HAM dan Kepolisian RI. Pada periode B12, Auriga belum melakukan ko-kreasi dengan Kepolisian RI.	Aktif
Target B18: Penyusunan draft kajian rekomendasi kepastian perlindungan hukum bagi pembela lingkungan	Capaian Target: Auriga Nusantara telah melakukan penyusunan kajian terkait dengan Perlindungan Hukum Bagi Pembela Lingkungan Hidup bersama dengan Komnas HAM dan Dit. Tindak Pidana Tertentu (Tipidter).	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Auriga dalam menyusun Kajian telah melibatkan Komnas HAM dan juga Dit Tipidter Polri secara aktif.	Aktif
Catatan Pelaksanaan: <ul style="list-style-type: none"> - Komnas HAM belum mengirimkan data dukung. Data Dukung perlu dikirimkan paling lambat 14 Hari setelah Laporan Monev dipublikasikan. - Kepolisian RI dan Auriga Nusantara telah melakukan ko-kreasi secara aktif terkait dengan penyusunan Draft Kajian Kepastian Perlindungan Hukum bagi Pembela Lingkungan. - Menuju Target B24, Auriga Nusantara perlu segera melakukan finalisasi terkait kajian untuk selanjutnya diserahkan kepada pemangku kepentingan terkait. 		

Komitmen 4
Mengawal Perumusan Peraturan Pelaksana Undang-Undang
Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

Ukuran Keberhasilan 1: Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Lembaga PDP yang mengatur terkait mekanisme koordinasi antara Lembaga PDP dengan K/L		
Kementerian Komunikasi dan Informatika		
Target B06 Tidak ada target untuk periode B06.	Capaian Target: Tidak ada target	Nilai: Tidak ada target
	Proses Ko-kreasi: Tidak ada target	Tidak ada target
Target B12: 1. Konsultasi publik untuk menjaring masukan publik terhadap konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai mekanisme koordinasi antara lembaga PDP dengan K/L terkait 2. Tersedianya masukan atas rencana kajian yang akan dilakukan	Capaian Target: Tidak mengumpulkan data dukung (Data dukung ditunggu sampai dengan H+7 Multistakeholder Forum II)	Nilai: 0%
	Proses Ko-kreasi: Tidak mengumpulkan data dukung (Data dukung ditunggu sampai dengan H+7 Multistakeholder Forum II)	Pasif
Target B18:	Capaian Target:	Nilai: N/A

Tersusunnya Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Lembaga PDP	Kementerian Komunikasi dan Informatika mengirimkan surat Perubahan Target Capaian terkait dengan PDP dan akan diproses lebih lanjut oleh Sekretariat OGI	
	Proses Ko-kreasi: Kementerian Komunikasi dan Informatika mengirimkan surat Perubahan Target Capaian terkait dengan PDP dan akan diproses lebih lanjut oleh Sekretariat OGI	N/A
Yayasan TIFA		
Target B06: Tidak ada target untuk periode B06.	Capaian Target: Tidak ada target	Nilai: Tidak ada target
	Proses Ko-kreasi: Tidak ada target	Tidak ada target
Target B12: 1. Keterlibatan dalam konsultasi publik untuk memberikan masukan terhadap konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai mekanisme koordinasi antara Lembaga PDP dengan K/L 2. Tersedianya rekomendasi pengaturan mekanisme koordinasi	Capaian Target: TIFA telah memberikan masukan terkait dengan Peraturan Turunan RUU PDP melalui portal masukan yang disediakan oleh Kemenkominfo.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Berdasarkan data dukung yang dikumpulkan, belum terlihat ada ko-kreasi yang terjalin antara Kominfo dan Yayasan TIFA.	Pasif

antara Lembaga PDP dengan K/L		
Target B18: Terlibat dalam uji publik Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Lembaga PDP	Capaian Target: Tidak ada laporan.	Nilai: N/A
	Proses Ko-kreasi: Tidak ada laporan.	N/A
Ukuran Keberhasilan 2: Diterimanya Rekomendasi Peraturan Turunan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi mengenai Pengendali Data Gabungan dari Masyarakat Sipil		
Kementerian Komunikasi dan Informatika		
Target B06 Keterlibatan dengan memberikan masukan atas kajian partisipatoris untuk proses penyusunan rekomendasi rancangan peraturan turunan mengenai pengendali data gabungan	Capaian Target: Telah memberikan masukan terhadap kajian partisipatoris yang dilakukan oleh Tifa terkait rekomendasi rancangan peraturan turunan pengendali data gabungan.	Nilai: 70%
	Proses Ko-kreasi: Ko-kreasi telah dilaksanakan antara Kominfo dengan Yayasan TIFA	Aktif
Target B12: Tidak ada target	Capaian Target: -	Nilai: -
	Proses Ko-kreasi: -	
Target B18: Keterlibatan proses	Capaian Target: Penjaringan masukan oleh berbagai macam pemangku kepentingan telah dilakukan oleh Kominfo.	Nilai: 100%

penyusunan rekomendasi rancangan peraturan turunan mengenai pengendali data gabungan	Proses Ko-kreasi: Berdasarkan informasi pdp.id, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan penjangkaran pendapat publik sebagai bentuk ko-kreasi	Semi-Aktif
Yayasan TIFA		
Target B06: Penyelenggaraan penyusunan kajian partisipatoris untuk proses penyusunan rekomendasi peraturan turunan mengenai pengendali data gabungan	Capaian Target: Kajian partisipatoris telah disusun substansi rekomendasi ditujukan dalam konteks peraturan turunan pengendali data gabungan. Meskipun belum ada peraturan turunan dari UU PDP yang membahas mengenai pengendalian data pribadi, rekomendasi pengendali data pribadi disesuaikan dengan konteks Indonesia dalam UU PDP yang cukup terbatas.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Ko-kreasi telah dilaksanakan melalui keterlibatan Kominfo dalam penyusunan kajian partisipatoris yang TIFA lakukan.	Aktif
Target B12: Penyelenggaraan kajian partisipatoris untuk menyusun rekomendasi peraturan turunan mengenai pengendali data gabungan	Capaian Target: Kajian partisipatoris telah disusun dan diselesaikan pada B06.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Ko-kreasi sudah dijalankan pada periode B06 saat kajian sedang disusun.	Aktif
Target B18: Tersusunnya rekomendasi rancangan peraturan turunan	Capaian Target: Tidak ada laporan.	Nilai: N/A
	Proses Ko-kreasi: Tidak ada laporan.	N/A

mengenai pengendali data gabungan		
Ukuran Keberhasilan 3: Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Lembaga PDP yang mengatur terkait peran Lembaga PDP dalam melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan transfer data pribadi ke luar negeri		
Kementerian Komunikasi dan Informatika		
Target B06:	Capaian Target:	Nilai: 0%
1. Konsultasi publik untuk menjangkau masukan publik terhadap konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai peran lembaga PDP dalam pengaturan transfer data ke luar negeri terlaksana	Tidak mengumpulkan data dukung	
	Proses Ko-kreasi:	Pasif
2. Tersedianya masukan atas rencana kajian yang akan dilakukan	Tidak mengumpulkan data dukung	
Target B12:	Capaian Target:	Nilai: 0%
Tersusunnya Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai lembaga PDP	Tidak mengumpulkan data dukung	
	Proses Ko-kreasi:	Pasif
	Tidak mengumpulkan data dukung	

Target B18: Tersedianya Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Lembaga PDP	Capaian Target: RPP terkait PDP telah tersedia. Saat ini Sedang masuk dalam proses PAK	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Dalam penyusunan RPP PDP, Kominfo telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pengamat teknologi informasi, dan juga organisasi masyarakat sipil	Aktif
Yayasan TIFA		
Target B06: Tidak ada target untuk periode B06.	Capaian Target: Tidak ada target	Nilai: Tidak ada target
	Proses Ko-kreasi: Tidak ada target	Tidak ada target
Target B12: 1. Keterlibatan dalam konsultasi publik untuk memberikan masukan terhadap konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Lembaga PDP yang mengatur terkait peran Lembaga PDP dalam melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan transfer data	Capaian Target: Tidak mengumpulkan data dukung	Nilai: 0%
	Proses Ko-kreasi: Tidak mengumpulkan data dukung (Data dukung ditunggu sampai dengan H+7 Multistakeholder Forum II)	Pasif

pribadi ke luar negeri 2. Tersedianya rekomendasi pengaturan peran Lembaga PDP dalam melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan transfer data pribadi ke luar negeri		
Target B18: Terlibat dalam uji publik Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Lembaga PDP	Capaian Target: Tidak ada laporan.	Nilai: N/A
	Proses Ko-kreasi: Tidak ada laporan.	N/A
Ukuran Keberhasilan 4: Keterlibatan dalam forum diskusi multipihak dalam membahas perkembangan proses penyusunan peraturan pelaksana UU PDP		
Kementerian Komunikasi dan Informatika		
Target B06: Tidak ada target untuk periode B06.	Capaian Target: Tidak ada target	Nilai: Tidak ada target
	Proses Ko-kreasi: Tidak ada target	Tidak ada target
Target B12:	Capaian Target: Tidak mengumpulkan data dukung	Nilai: 0%

Keterlibatan dalam pembahasan mengenai perkembangan proses penyusunan peraturan pelaksana UU PDP	(Data dukung ditunggu sampai dengan H+7 Multistakeholder Forum II)	
	Proses Ko-kreasi: Tidak mengumpulkan data dukung (Data dukung ditunggu sampai dengan H+7 Multistakeholder Forum II)	Pasif
Target B18: Keterlibatan dalam pembahasan mengenai perkembangan proses penyusunan peraturan pelaksana UU PDP	Capaian Target: Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pembahasan terkait pengembangan penyusunan peraturan pelaksana UU PDP dengan berbagai pemangku kepentingan	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan ko-kreasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Namun, belum terdapat informasi sejauh mana masukan publik diterima oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.	Semi-Aktif
Yayasan TIFA		
Target B06: Terlaksananya penjangkaran masukan dari kelompok masyarakat sipil dan sektor privat mengenai proses dan substansi peraturan pelaksana UU Perlindungan Data Pribadi	Capaian Target: Tidak mengumpulkan data dukung	Nilai: 0%
	Proses Ko-kreasi: Tidak mengumpulkan data dukung	Pasif
Target B12:	Capaian Target: Tidak mengumpulkan data dukung	Nilai: 0%

Terlaksananya forum diskusi pertama dengan melibatkan pemerintah, sektor privat, dan masyarakat sipil	(Data dukung ditunggu sampai dengan H+7 Multistakeholder Forum II)	
	Proses Ko-kreasi: Tidak mengumpulkan data dukung (Data dukung ditunggu sampai dengan H+7 Multistakeholder Forum II)	Pasif
Target B18: Terlaksananya forum diskusi kedua dengan melibatkan pemerintah, sektor privat, dan masyarakat sipil	Capaian Target: Tidak ada laporan.	Nilai: N/A
	Proses Ko-kreasi: Tidak ada laporan.	N/A
Catatan Pelaksanaan: <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Komunikasi telah mengirimkan surat perubahan Target Capaian pelaksanaan aksi ini. Sekretariat OGI akan menindaklanjuti dengan rapat tiga pihak antara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Yayasan Tifa, dan Sekretariat Nasional OGI - Yayasan TIFA perlu untuk mengirimkan Data Dukung. 		

Komitmen 5

Penyusunan Mekanisme Penanganan Pemilu dari Disinformasi

Ukuran Keberhasilan 1:		
Tersusunnya mekanisme penanganan pengaduan disinformasi dalam Pemilihan Umum		
Badan Pengawasan Pemilihan Umum		
Target B06 Adanya draft mekanisme penanganan panduan Disinformasi dalam Pemilu 2024	Capaian Target: Bawaslu telah membuat mekanisme penanganan disinformasi Pemilu melalui platofrm “Jarimu Awasi Pemilu.” Platform tersebut dapat digunakan oleh seluruh masyarakat untuk melaporkan disinformasi terkait dengan Pemilu. Dalam melakukan verifikasi terkait disinformasi tersebut, Bawaslu juga bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Organisasi Masyarakat Sipil, dan Swasta (penyedia sosial media).	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Bawaslu telah melibatkan KOPEL untuk mendiskusikan terkait mekanisme penanganan disinformasi Pemilu.	Aktif
Target B12: Mekanisme penanganan pengaduan disinformasi disetujui oleh Ketua Bawaslu	Capaian Target: Bawaslu telah menyusun mekanisme pengaduan Disinformasi melalui Kanal Jarimu Awasi Pemilu. Mekanisme juga disusun dengan melakukan kerja sama dengan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Bawaslu telah mengimplementasikan target capaian B12 dengan pelibatan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia.	Aktif
Target B18: Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan	Capaian Target: Tidak ada laporan.	Nilai: N/A
	Proses Ko-kreasi: Tidak ada laporan.	N/A

mekanisme pengaduan disinformasi		
Komite Pemantau Legislatif		
Target B06: - Audiensi untuk menyampaikan policy brief pentingnya panduan penanganan pengaduan disinformasi dalam Pemilu - Adanya poin-poin masukan untuk mekanisme penanganan pengaduan disinformasi	Capaian Target: KOPEL telah melakukan Audiensi untuk menyampaikan Policy brief mengenai penanganan pengaduan disinformasi dalam Pemilu. Audiensi sudah dilakukan kepada unit kerja terkait dengan staff ahli komisioner Bawaslu.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: KOPEL telah berinisiatif membangun Ko-kreasi dengan Bawaslu, dan upaya tersebut diterima baik Bawaslu dengan bentuk diadakannya Audiensi sebanyak dua kali antara KOPEL dan Bawaslu.	Aktif
Target B12: Hasil review rancangan awal mekanisme pengaduan disampaikan kepada komisioner Bawaslu	Capaian Target: KOPEL dan Bawaslu telah menyusun pedoman terkait dengan mekanisme disinformasi Pemilu melalui portal Jarimu Awasi Pemilu.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: KOPEL dan Bawaslu sudah melakukan ko-kreasi untuk pencapaian target B12.	Aktif
Target B18: Input hasil monitoring terhadap pelaksanaan mekanisme pengaduan	Capaian Target: KOPEL bersama dengan Koalisi Pemantau Pemilu telah menyusun rekomendasi terkait dengan pelaksanaan mekanisme pengaduan disinformasi Pemilu 2024 untuk diserahkan kepada Bawaslu.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi:	Aktif

disinformasi pemilu 2024	KOPEL dan Koalisi Pemantau Pemilu telah melaporkan hasil masukannya terkait dengan Pelaksanaan Mekanisme Pengaduan Disinformasi Pemilu 2024	
Ukuran Keberhasilan 2: Pelaksanaan Forum Multistakeholder dalam penyusunan mekanisme penanganan pengaduan disinformasi		
Badan Pengawasan Pemilihan Umum		
Target B06 Keterlibatan dalam Forum Multistakeholder dalam rangka Penyusunan Mekanisme Penanganan Disinformasi Pemilu	Capaian Target: Bawaslu telah terlibat dalam Forum Multistakeholder yang diselenggarakan oleh KOPEL. Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu menerima usulan serta masukan dari OMS terkait mekanisme penanganan disinformasi Pemilu.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Bawaslu telah menerima rekomendasi dari KOPEL dan unsur OMS terkait dengan usulan proses atau mekanisme penanganan disinformasi Pemilu	Aktif
Target B12: Keterlibatan dalam Forum Multistakeholder dalam rangka Penyusunan Mekanisme Penanganan Disinformasi Pemilu	Capaian Target: Bawaslu telah menghadiri dan melakukan komunikasi dengan berbagai unsur Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam melakukan dan menyusun mekanisme penanganan Disinformasi Pemilu.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Bawaslu dan OMS telah melakukan ko-kreasi dalam Forum Multipihak dalam rangka penyusunan mekanisme penanganan Disinformasi Pemilu.	Aktif
Target B18: Keterlibatan dalam Forum Multistakeholder dalam rangka Penyusunan	Capaian Target: Tidak ada laporan.	Nilai: N/A
	Proses Ko-kreasi: Tidak ada laporan.	N/A

Mekanisme Penanganan Disinformasi Pemilu		
Komite Pemantau Legislatif		
Target B06: Memfasilitasi Forum multistakeholder memberikan masukan pada draft mekanisme penanganan pengaduan disinformasi	Capaian Target: KOPEL telah memfasilitasi pertemuan untuk memberikan masukan dan draft penanganan kepada Bawaslu. Selanjutnya Bawaslu diharapkan dapat menindaklanjuti masukan dari KOPEL. Proses Ko-kreasi: Inisiatif Proses Ko-kreasi telah dilakukan oleh KOPEL dengan Bawaslu.	Nilai: 100% Aktif
Target B12: Memfasilitasi Forum multistakeholder memberikan masukan pada draf akhir mekanisme penanganan pengaduan disinformasi	Capaian Target: Telah dilakukan FGD dengan Bawaslu terkait mekanisme penanganan Hoax. Proses Ko-kreasi: Telah terselenggara ko-kreasi antara Bawaslu, KOPEL, dan Koalisi CSO lainnya yang bergerak di isu pemilihan umum.	Nilai: 100% Aktif
Target B18: Memfasilitasi Forum multistakeholder memberikan masukan pada monev penanganan pengaduan disinformasi	Capaian Target: Masukan telah disusun dan diberikan oleh KOPEL kepada Penyelenggara Pemilu. Masukan dapat menjadi catatan untuk evaluasi dalam penyelenggaraan Pilkada Proses Ko-kreasi: KOPEL dan Bawaslu telah melaksanakan Ko-kreasi yang aktif dalam melakukan evaluasi terkait sistem pengaduan disinformasi yang dibangun oleh Bawaslu	Nilai: 100% Aktif

Catatan Pelaksanaan:

- Target Capaian KOPEL dan Bawaslu hanya sampai B18
- KOPEL dan Bawaslu telah melaksanakan Ko-kreasi dengan baik dalam upayanya untuk membangun mekanisme untuk menangani Misinformasi dan Disinformasi.
- Bawaslu belum mengirimkan data dukung. Data Dukung perlu dikirimkan paling lambat 14 Hari setelah Laporan Monev dipublikasikan.
- Berdasarkan hasil pelaksanaan Mekanisme Pemantauan Disinformasi Pemilu yang dilakukan Bawaslu, KOPEL, dan Koalisi Pemantau Pemilu lainnya, pelaksanaan mekanisme Pengawasan yang saat ini dilakukan diperlukan peningkatan lebih lanjut sebagaimana masukan dari Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)

Komitmen 6

Keterbukaan Tata Kelola Data Pemilihan Umum

Ukuran Keberhasilan: Tersedianya Data Pemilu dalam format data terbuka (<i>open data</i>)		
Komisi Pemilihan Umum (KPU)		
Target B06 1. Tersedianya Data Profil Partai Politik Peserta Pemilu (SIPOL)	Capaian Target: KPU telah membuka Informasi Partai Politik dan Informasi Peta Daerah Pemilihan (DAPIL). Portal tersebut dapat diakses oleh publik melalui portal info pemilu.	Nilai: 100%
2. Tersedianya data peta daerah pemilihan dalam format data terbuka (SIDAPIL)	Proses Ko-kreasi: KPU telah melakukan Ko-kreasi dengan Perludem terkait dengan jenis dan format data yang dibutuhkan terkait dengan SIPOL dan SIDAPIL 2024.	Aktif
Target B12: Tersedianya Data Peserta Pemilu (Presiden-Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD) dalam format data terbuka (SILON)	Capaian Target: Data Peserta Pemilu Legislatif dan Eksekutif telah dibuka oleh KPU melalui portal Info Pemilu. Adapun link untuk mengakses informasi terkait sistem pencalonan dapat dibuka melalui link berikut: DPR: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dct_dpr DPRD Provinsi: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dct_dprprov DPRD Kab/Kota: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dct_dprd Presiden - Wakil Presiden: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Pwp/Pengundian_nomor_urut	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi:	Pasif

	Berdasarkan data dukung yang dikumpulkan, belum terlihat apakah ada ko-kreasi yang terjadi antara KPU dan Perludem.	
Target B18: 1. Tersedianya data laporan dana kampanye Peserta Pemilu dalam format data terbuka (SIDAKAM) 2. Tersedianya data hasil pemilu dalam format data terbuka (Hasil Form C1)	Capaian Target: Tidak ada laporan	Nilai: N/A
	Proses Ko-kreasi: Tidak ada laporan.	N/A
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)		
Target B06: Terselenggaranya workshop dengan penyelenggara Pemilu dan Masyarakat Sipil untuk menyusun rekomendasi jenis-jenis data dalam setiap dataset Pemilu	Capaian Target: Perludem telah melaksanakan workshop dengan OMS. Workshop dilakukan untuk menjaring masukan terkait pentingnya keterbukaan data pemilihan umum serta tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan keterbukaan data Pemilihan Umum. Namun workshop belum dilakukan bersama dengan penyelenggara pemilu, sehingga masukan belum dapat diterima oleh penyelenggara Pemilu.	Nilai: 80%
	Proses Ko-kreasi: Proses Ko-kreasi antara KPU dan Perludem belum terlihat. Belum ada kerjasama yang dilakukan untuk mewujudkan keterbukaan data Pemilihan Umum.	Aktif
Target B12:	Capaian Target: Tidak mengumpulkan data dukung	Nilai: 0%

Terselenggaranya workshop dengan masyarakat sipil dan komunitas teknologi untuk menyusun rekomendasi strategi penyediaan serta pemanfaatan data Pemilu	(Data dukung ditunggu sampai dengan H+7 Multistakeholder Forum II)	
	Proses Ko-kreasi: Tidak mengumpulkan data dukung (Data dukung ditunggu sampai dengan H+7 Multistakeholder Forum II)	Pasif
Target B18: Terselenggaranya koordinasi dengan KPU mengenai persiapan penyediaan data laporan dana kampanye dan hasil pemilu dalam format data terbuka	Capaian Target: Tidak ada laporan.	Nilai: N/A
	Proses Ko-kreasi: Tidak ada laporan.	N/A
Catatan Pelaksanaan: Seluruh Stakeholders belum mengirimkan data dukung. Data Dukung perlu dikirimkan paling lambat 14 Hari setelah Laporan Monev dipublikasikan.		

Komitmen 7

Penyediaan Pedoman Aksesibilitas Digital Layanan Komunikasi dan Informasi Publik yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas

Ukuran Keberhasilan: Tersusunnya pedoman Layanan Komunikasi dan Informasi Publik yang Ramah bagi Penyandang Disabilitas termasuk aksesibilitas digital		
Kementerian Komunikasi dan Informatika		
Target B06 Merumuskan pedoman Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Yang Ramah Bagi Penyandang Disabilitas termasuk aksesibilitas digital	Capaian Target: Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan perumusan Pedomann Layanan Komunikasi dan Informasi Publik yang Ramah bagi Penyandang Disabilitas melalui kegiatan pemetaan permasalahan dan gambaran singkat kondisi aksesibilitas digital di Indonesia.	Nilai:100%
	Proses Ko-kreasi: Kominfo telah melakukan ko-kreasi secara Aktif bersama dengan Suarise untuk memastikan keterlibatan masyarakat sipil dalam proses pemetaan permasalahan serta mendeskripsikan gambaran singkat kondisi aksesibilitas digital di Indonesia.	Aktif
Target B12: Menyusun pedoman Layanan Komunikasi dan Informasi Publik yang Ramah Bagi Penyandang Disabilitas termasuk aksesibilitas digital	Capaian Target: Kominfo telah menyusun Pedoman LKIP bersama dengan Suarise secara Ko-kreasi. Dapat dilakukan penelaahan lebih lanjut terkait pedoman dan mendorong implementasi dari Pedoman LKIP Penyandang Disabilitas.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Penyusunan Pedoman LKIP telah dilakukan bersama-sama oleh Kominfo dan Suarise.	Aktif
Target B18:	Capaian Target: Tidak ada target	Nilai:

Tidak ada target		Tidak ada target
	Proses Ko-kreasi: Tidak ada target	Tidak ada target
Suarise		
Target B06: Melakukan penyusunan pemetaan permasalahan dan gambaran singkat terkait kondisi aksesibilitas digital bagi kelompok disabilitas	Capaian Target: Suarise telah melakukan pemetaan mengenai permasalahan dan gambaran singkat terkait kondisi aksesibilitas digital bagi kelompok disabilitas.	Nilai:100%
	Proses Ko-kreasi: Suarise dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan ko-kreasi melalui penyelenggaraan pemetaan permasalahan secara kolaboratif. Kedepannya diharapkan proses ko-kreasi dapat berlanjut sampai penyusunan kebijakan.	Aktif
Target B12: Keterlibatan dalam penyusunan panduan/ petunjuk teknis terkait aksesibilitas digital bagi kelompok disabilitas	Capaian Target: Suarise dan Kominfo sudah menyusun Pedoman LKIP Aksesibilitas Digital secara ko-kreasi. Suarise juga mengumpulkan data dukung berupa notulensi dan dokumentasi rapat pembahasan pedoman LKIP dan bahan paparan.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Suarise dan Kominfo sudah melakukan ko-kreasi aktif untuk menyusun pedoman.	Aktif
Target B18: Berpartisipasi aktif dalam penyusunan Pedoman terkait aksesibilitas digital bagi kelompok disabilitas	Capaian Target: Suarise telah berpartisipasi secara aktif dan progresif untuk keterlibatannya dalam penyusunan pedoman aksesibilitas digital bagi kelompok disabilitas. Selanjutnya Dit. TKKP perlu untuk menindaklanjuti masukan-masukan Suarise terkait dengan Aksesibilitas Digital	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi:	Aktif

	Suarise telah berpartisipasi secara aktif untuk memberikan masukannya dalam Penyusunan Pedoman terkait Aksesibilitas Digital bagi Kelompok Disabilitas	
Tindak Lanjut B24: <ul style="list-style-type: none"> - Kominfo bersama Suarise perlu untuk segera menetapkan Pedoman yang disusun secara resmi. - Pedoman LKIP Aksesibilitas Digital dapat disusun dalam Peraturan Menteri terkait atau melakukan sosialisasi dan pilot projecting kepada K/L atau Pemda terkait. 		

Komitmen 8

Akuntabilitas Sosial Keterbukaan Anggaran Desa

Ukuran Keberhasilan 1:		
Publikasi APBDes dan pertanggungjawaban APBDes melalui website desa		
Kementerian Dalam Negeri		
Target B06 Fasilitasi untuk sosialisasi dan bimbingan teknis bagi aparatur pemerintah desa	Capaian Target: Kementerian Dalam Negeri telah melakukan sosialisasi terkait dengan keuangan desa kepada aparatur desa. Selain itu Kementerian Dalam Negeri turut berpartisipasi dalam kegiatan penguatan transparansi pemerintah desa bersama dengan Transparency International Indonesia (TI Indonesia).	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Transparency International Indonesia telah berkolaborasi dalam kegiatan sosialisasi penguatan transparansi anggaran pemerintahan desa.	Aktif
Target B12: Tidak ada target	Capaian Target: -	Nilai: -
	Proses Ko-kreasi: -	
Target B18: Review bersama hasil pendampingan	Capaian Target: TI Indonesia tidak melaksanakan kegiatan terkait pendampingan Desa yang mengundang Kementerian Dalam Negeri, dan tidak menyampaikan hasil pendampingan yang dapat direview	Nilai: N/A
	Proses Ko-kreasi: TI Indonesia tidak melaksanakan kegiatan terkait pendampingan Desa yang mengundang Kementerian Dalam Negeri, dan tidak menyampaikan hasil pendampingan yang dapat direview	N/A

Transparency International Indonesia		
Target B06: 1. Pendampingan aparat desa dalam penguatan keterbukaan informasi publik 2. Peningkatan kapasitas aparat desa	Capaian Target: TI Indonesia telah melakukan pendampingan kepada aparat desa berkaitan dengan penguatan keterbukaan informasi publik. Kegiatan dilakukan dalam bentuk webinar yang mengundang dan dihadiri oleh 15 perwakilan desa pilot project di Aceh, Jember, dan Kabupaten Kupang.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Kegiatan pendampingan kepada aparat desa dilakukan secara ko-kreasi oleh TI Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri	Aktif
Target B12: 1. Pendampingan aparat desa dalam penyusunan daftar informasi publik dan klasifikasi informasi publik 2. Pendampingan aparat pemerintah desa dalam penyusunan rencana belanja pengadaan barang dan jasa desa	Capaian Target: 1. TI Indonesia sudah melakukan pendampingan perangkat desa dalam melakukan penyusunan klasifikasi informasi publik di tingkat desa. Pasca pendampingan tersebut, perangkat desa melakukan penyusunan daftar informasi publik di desa. 2. TI Indonesia telah melakukan pendampingan penyusunan APBDes	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: TI Indonesia telah melakukan ko-kreasi dengan perangkat desa.	Aktif
Target B18: Penyusunan matriks rencana belanja desa	Capaian Target: Tidak terdapat laporan matriks yang dikerjakan. Kegiatan dilaksanakan sendiri tanpa melibatkan Kemendagri	Nilai: 0%
	Proses Ko-kreasi: TI Indonesia tidak melaksanakan kegiatan terkait pendampingan Desa yang mengundang	Pasif

	Kementerian Dalam Negeri, dan tidak menyampaikan hasil pendampingan yang dapat direview	
Ukuran Keberhasilan 2: Penguatan warga dalam pengawasan keuangan desa		
Kementerian Dalam Negeri		
Target B06 Fasilitasi untuk sosialisasi dan bimbingan teknis bagi masyarakat dan pendamping desa.	Capaian Target: Tidak teridentifikasi bentuk dukungan yang dapat diberikan oleh Kemendagri	Nilai: N/A
	Proses Ko-kreasi: Tidak teridentifikasi bentuk dukungan yang dapat diberikan oleh Kemendagri	N/A
Target B12: Fasilitasi untuk sosialisasi dan bimbingan teknis bagi masyarakat dan pendamping desa	Capaian Target: Kemendagri telah melakukan pendampingan kepada Aparatur Pemerintahan Desa terkait dengan pengelolaan keuangan desa.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Belum terlihat proses Ko-kreasi Kementerian Dalam Negeri dengan OMS.	Pasif
Target B18: Fasilitasi untuk sosialisasi dan bimbingan teknis bagi masyarakat dan pendamping desa	Capaian Target: TI Indonesia tidak melaksanakan kegiatan terkait pendampingan Desa yang mengundang Kementerian Dalam Negeri, dan tidak menyampaikan hasil pendampingan yang dapat direview	Nilai: N/A
	Proses Ko-kreasi: TI Indonesia tidak melaksanakan kegiatan terkait pendampingan Desa yang mengundang Kementerian Dalam Negeri, dan tidak menyampaikan hasil pendampingan yang dapat direview	N/A
Transparency International Indonesia		

Target B06: Adanya kelompok masyarakat yang aktif mengawasi keuangan desa	Capaian Target: TI Indonesia telah mendampingi 15 Desa di Jember, Kupang dan Aceh untuk membentuk kelompok masyarakat yang aktif untuk mengawasi keuangan desa. Kelompok masyarakat tersebut terdiri dari 45 Pemuda untuk 15 Desa di masing-masing wilayah. TI Indonesia juga telah melakukan pelatihan mengenai bagaimana cara atau proses mengawasi keuangan desa.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: TI Indonesia perlu melaksanakan rapat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk merumuskan bentuk fasilitasi yang diperlukan, baik untuk Target Capaian Semester 1 dan Semester 2.	Pasif
Target B12: Tersedianya modul pemantauan sistem keuangan desa	Capaian Target: TI Indonesia telah menyusun modul akuntabilitas sosial pengelolaan keuangan desa, yang disusun melalui kolaborasi antara TI Indonesia dan mitra jaringan di Aceh, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Jember. Penyusunan modul ini telah melalui tahapan diskusi dengan para ahli, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan perwakilan Kemendes PDTT	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Penyusunan modul telah melibatkan perwakilan K/L/D secara aktif.	Aktif
Target B18: Peningkatan Kapasitas warga desa dalam pengawasan sistem keuangan desa	Capaian Target: Belum dilaksanakannya Peningkatan Kapasitas Lanjutan kepada Desa dampingan terkait pelaksanaan Akuntabilitas Anggaran Desa. Selain itu, kegiatan ini juga belum melibatkan Kementerian Dalam Negeri untuk berpartisipasi	Nilai: 0%
	Proses Ko-kreasi: TI Indonesia tidak melaksanakan kegiatan terkait pendampingan Desa yang mengundang Kementerian Dalam Negeri, dan tidak	Pasif

	menyampaikan hasil pendampingan yang dapat direview	
Catatan Pelaksanaan: <ul style="list-style-type: none"> - TI Indonesia perlu untuk segera melaksanakan Program Akuntabilitas Anggaran Desa yang dapat melibatkan Kementerian Dalam Negeri secara aktif. Hal dapat dijadikan sebagai model atau praktik baik keterbukaan anggaran desa yang diharapkan dapat dilaksanakan di wilayah lainnya. - Akan dilaksanakan rapat tiga pihak antara TI Indonesia, Kemendagri, dan Sekretariat OGI untuk memastikan strategi percepatan sampai dengan B24 		

Komitmen 9

Akuntabilitas Sosial Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Desa

Ukuran Keberhasilan 1:		
Implementasi akuntabilitas sosial dalam proses musyawarah desa		
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi		
Target B06 Persiapan Sosialisasi Akuntabilitas Sosial dan Pemerintah Desa	Capaian Target: Kementerian Desa PDTT telah melakukan sosialisasi terkait Akuntabilitas Sosial Pemerintah Desa melalui program-program Sekolah Lapang. Kemendesa PDTT juga telah menerima audiensi WVI mengenai penyusunan kajian dan petunjuk teknis terkait dengan Musyawarah Desa.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Ko-kreasi dengan WVI belum terlihat. Namun sudah melakukan Ko-kreasi dengan OMS lain, seperti Lakpesdam dan Kemitraan . Kementerian Desa PDTT juga telah menerima audiensi WVI dalam rangka penyusunan kajian mengenai akuntabilitas sosial.	Aktif
Target B12: Sosialisasi Akuntabilitas Sosial dan Pemerintah Desa	Capaian Target: Kementerian Desa PDTT telah melakukan pendampingan dan sosialisasi terkait dengan replikasi P3PD Subkomponen 2B kepada Pemerintah Desa.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Kemendesa PDTT dan WVI akan melakukan Diseminasi Kajian Inisiasi Akuntabilitas Sosial dalam Musyawarah Desa pada 31 Januari 2024.	Aktif
Target B18: Fasilitasi implementasi	Capaian Target: Kementerian Desa PDTT telah melakukan fasilitasi implementasi Akuntabilitas Sosial bersama dengan OMS Lakpesdam NU	Nilai: 100%

Akuntabilitas Sosial	Proses Ko-kreasi: Kementerian Desa PDTT telah melakukan Ko-kreasi dengan unsur OMS, yaitu Lakpesdam NU untuk melaksanakan model akuntabilitas sosial. Kementerian Desa PDTT juga dapat memaksimalkan ko-kreasi dengan WVI	Aktif
Wahana Visi Indonesia		
Target B06: 1. Tersedianya kajian & Juknis akuntabilitas sosial dalam musyawarah desa. 2. Diadakannya dialog/diskusi publik mengenai akuntabilitas sosial dalam musyawarah desa	Capaian Target: <ul style="list-style-type: none"> Wahana Visi Indonesia (WVI) telah melaksanakan audiensi dengan Kemendesa PDTT mengenai kajian dalam musyawarah desa. Berdasarkan hasil pertemuan, Kemendesa PDTT siap membantu dalam penyusunan kajian tersebut. Selain itu WVI juga telah menyusun draft kajian mengenai Musyawarah Desa. Petunjuk teknis akuntabilitas sosial dalam musyawarah desa belum dilaksanakan dan disusun oleh WVI. WVI telah melakukan dialog dan diskusi mengenai musyawarah desa dengan masyarakat desa di Kabupaten Ende, Ngada, dan Kupang, Nusa Tenggara Timur. 	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: WVI telah menyelenggarakan diskusi dengan Kementerian Desa PDTT dalam menyusun kajian dan juknis terkait akuntabilitas sosial dalam musyawarah desa.	Aktif
Target B12: Sosialisasi dan pelatihan Juknis Akuntabilitas Sosial dalam Musyawarah Desa.	Capaian Target: Telah dilakukan pendampingan kepada daerah tertentu, tetapi untuk peluncuran masih menunggu jadwal.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Kemendesa PDTT dan WVI akan melakukan Diseminasi Kajian Inisiasi Akuntabilitas Sosial dalam Musyawarah Desa pada 31 Januari 2024.	Aktif
Target B18:	Capaian Target:	Nilai:

Implementasi akuntabilitas	Telah dilaksanakan Diseminasi bersama dengan Kemendes PDTT	100%
sosial dalam musyawarah desa melalui pilot project	Proses Ko-kreasi: Kemenderian Desa PDTT dan WVI telah melaksanakan akuntabilitas sosial pada masing-masing daerah pilot project.	Aktif
Ukuran Keberhasilan 2: Implementasi metode Program Review dalam proses pembangunan pemerintah di tingkat desa		
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi		
Target B06	Capaian Target:	Nilai: 100%
Persiapan Sosialisasi Akuntabilitas Sosial dan Pemerintah Desa	Kemendesa PDTT telah melakukan sosialisasi terkait Akuntabilitas Sosial Pemerintah Desa melalui program-program Sekolah Lapang	
	Proses Ko-kreasi: Belum terdapat Ko-kreasi antara Kemendesa PDTT dengan Yayasan TIFA karena tidak adanya pelibatan dalam kegiatan Program Review	N/A
Target B12:	Capaian Target:	Nilai: 100%
Sosialisasi Akuntabilitas Sosial dan Pemerintah Desa	Telah dilaksanakan serangkaian kegiatan sosialisasi Akuntabilitas Sosial dan Pemerintah Desa, antara lain Rapat Sosialisasi dan Diseminasi P3PD Subkomponen 2B (24-26 Oktober 2023) dan Workshop Replikasi P3PD Sub Komponen 2B (6-8 November 2023).	
	Proses Ko-kreasi: Belum terlihat proses Ko-kreasi Kemendesa PDTT dengan Yayasan TIFA.	Aktif
Target B18:	Capaian Target:	Nilai:
Fasilitasi implementasi	Kemenderian Desa PDTT telah melakukan fasilitasi implementasi akuntabilitas sosial	100%
Akuntabilitas Sosial	Proses Ko-kreasi:	Aktif

	Kementerian Desa PDTT telah melibatkan Organisasi Masyarakat Sipil untuk melakukan fasilitasi implementasi Akuntabilitas Sosial. Namun, karena tidak ada perkembangan Program Review lebih lanjut oleh Yayasan TIFA, maka belum dilaksanakan Ko-kreasi dengan Yayasan TIFA	
Yayasan TIFA		
Target B06: Tersedianya peraturan di tingkat desa yang mendukung dan mengesahkan pelaksanaan Program Review sebagai metode mendukung Akuntabilitas Sosial	Capaian Target: Yayasan TIFA telah mendampingi Desa Sriharjo dan Desa Guwosari dalam menyusun Peraturan Desa mengenai Pelaksanaan Program Review pada kedua desa tersebut. Peraturan tersebut telah selesai disusun dan dipublikasikan	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Belum terlihat proses Ko-kreasi yang dilakukan Yayasan TIFA dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.	Pasif
Target B12: 1. Sosialisasi akuntabilitas sosial pada area non uji coba. 2. Tercapainya akuntabilitas sosial program pemerintah menggunakan metode Program Review. 3. Terlaksananya uji coba Program Review sebagai metode alternatif akuntabilitas	Capaian Target: Tidak mengumpulkan data dukung	Nilai: 0%
	Proses Ko-kreasi: Tidak mengumpulkan data dukung	Pasif

sosial di tingkat Kabupaten.		
Target B18: Terselenggaranya seminar/webinar publik mengenai akuntabilitas sosial dan metode-metode untuk mencapainya baik di tingkat desa maupun kabupaten (salah satunya pengalaman Program Review di tingkat Desa dan Kabupaten)	Capaian Target: Tidak ada laporan.	Nilai: N/A
	Proses Ko-kreasi: Tidak ada laporan.	N/A
Tindak Lanjut B24: <ul style="list-style-type: none"> - WVI dan Kemendesa PDTT telah melakukan Ko-kreasi dengan baik - Yayasan Tifa perlu untuk melaporkan Data Dukung paling lambat 14 Hari setelah Laporan Monev dipublikasikan. 		

Komitmen 10

Terlaksananya Proses Penyusunan RUU KKR untuk Memenuhi Hak atas Kebenaran

Ukuran Keberhasilan 1: Tersedianya Naskah Akademik (NA) RUU KKR sebagai bagian dari proses penyusunan kebijakan penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu		
BPHN Kementerian Hukum dan HAM		
Target B06: Tidak ada target untuk periode B06.	Capaian Target: Tidak ada target	Nilai: Tidak ada target
	Proses Ko-kreasi: Tidak ada target	Tidak ada target
Yayasan TIFA, Yayasan Indonesia untuk Kemanusiaan, KontraS Aceh		
Ukuran Keberhasilan 2: Adanya <i>policy paper</i> mengenai KKR dari masyarakat sipil sebagai salah satu dasar pemikiran untuk mendukung kebijakan penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu		
Target B06: Adanya proses penyusunan <i>policy paper</i> dari masyarakat sipil untuk mendukung penyusunan NA dan draf RUU KKR	Capaian Target: Telah dilakukan proses penyusunan <i>policy paper</i> “Usulan Pelembagaan Kebijakan Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu: Membangun Mekanisme Pengungkapan Kebenaran untuk Pemulihan Korban”. Dokumen terdiri atas muatan mengenai prinsip-prinsip penghapusan impunitas, catatan dan refleksi kritis pelaksanaan di berbagai negara, dan usulan pembentukan	Nilai: 100%

	komite pengungkapan kebenaran dalam konteks Indonesia saat ini.	
	Proses Ko-kreasi: Kementerian/Lembaga, OMS dan masyarakat umum berdiskusi mengenai topik di kegiatan Open Government Week 2023, yang menjadi salah satu masukan untuk penulisan draf.	Aktif
Catatan Komitmen: Komitmen tidak dilanjutkan sehubungan dengan adanya upaya non-yudisial dari pemerintah atas penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.		

Komitmen 11

Aksesibilitas dan Akuntabilitas Proses Peradilan

Ukuran Keberhasilan 1: Adanya peraturan teknis atas jaminan akomodasi yang layak bagi disabilitas berhadapan dengan hukum		
Kejaksaan Agung		
Target B06: Terlaksananya peluncuran pedoman penanganan perkara yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan	Capaian Target: Pada 30 Mei 2023, Jaksa Agung Republik Indonesia telah menetapkan Pedoman Nomor 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Pedoman ini disusun secara ko-kreasi dengan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dan Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB). Pedoman telah diluncurkan dan disosialisasikan pada 3 Agustus 2023.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Kejaksaan Agung telah berkolaborasi secara dekat dengan IJRS mulai dari proses penyusunan, penetapan, hingga diskusi untuk peluncuran Pedoman.	Aktif
Target B12: Adanya penyusunan materi sosialisasi dari peraturan teknis atas jaminan akomodasi yang layak bagi disabilitas berhadapan dengan	Capaian Target: Kejaksaan Agung sudah melakukan sosialisasi melalui diskusi yang diselenggarakan pada kegiatan Peluncuran Pedoman Kejaksaan Agung Nomor 2 Tahun 2023. Selain itu, Kejaksaan Agung telah membuat materi diklat mengenai penanganan perkara yang adil untuk penyandang disabilitas berhadapan dengan	Nilai: 100%

hukum di Kejaksaan	hukum yang juga akan memuat materi mengenai Pedoman Kejaksaan Agung Nomor 2 Tahun 2023.	
	Proses Dalam penyusunan materi diklat, Kejaksaan Agung telah melibatkan Pusham UII Jogja.	Ko-kreasi: Aktif
Target B18: 1. Adanya sosialisasi dari peraturan teknis atas jaminan akomodasi yang layak bagi disabilitas berhadapan dengan hukum 2. Penyusunan kurikulum mata diklat untuk materi Penanganan Perkara yang Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan	Capaian Target: Sosialisasi terkait Peraturan Teknis atas Jaminan Akomodasi yang Layak telah dilakukan Kejaksaan RI kepada seluruh Kejaksaan di berbagai Pemerintah Daerah. Materi kurikulum Diklat juga telah memuat materi terkait penanganan Perkara yang Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi Kejaksaan telah melakukan Ko-kreasi secara aktif dengan IJRS	Aktif
Indonesia Judicial Research Society		
Target B06: Adanya peraturan teknis atas jaminan akomodasi yang layak bagi disabilitas berhadapan dengan hukum di Kejaksaan	Capaian Target: Pada 30 Mei 2023, Jaksa Agung Republik Indonesia telah menetapkan Pedoman Nomor 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Dalam prosesnya, masyarakat sipil (IJRS dan	Nilai: 100%

berdasarkan masukan dari masyarakat sipil	SIGAB) terlibat dalam memberi masukan dan asistensi dari keseluruhan proses, serta terlibat dalam persiapan peluncuran Pedoman. Peluncuran Pedoman terjadwalkan pada 3 Agustus 2023.	
	Proses Ko-kreasi: Kejaksaan Agung telah berkolaborasi secara dekat dengan IJRS mulai dari proses penyusunan, penetapan, hingga diskusi untuk peluncuran Pedoman.	Aktif
Target B12: Adanya penyusunan materi sosialisasi dari peraturan teknis atas jaminan akomodasi yang layak bagi disabilitas berhadapan dengan hukum di Kejaksaan	Capaian Target: IJRS terlibat dalam sosialisasi Pedoman Kejaksaan Agung Nomor 3 Tahun 2022 melalui diskusi yang diselenggarakan pada peluncuran pedoman. IJRS belum dilibatkan dalam penyusunan materi diklat, namun Pusham UII selaku perwakilan OMS yang juga terlibat dalam implementasi komitmen ini sudah dilibatkan.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Kejaksaan Agung telah melibatkan IJRS dalam sosialisasi melalui kegiatan peluncuran. Selain itu, OMS yang juga terlibat dalam implementasi komitmen, Pusham UII, telah terlibat dalam penyusunan materi diklat.	Aktif
Target B18: Adanya sosialisasi dari peraturan teknis atas jaminan	Capaian Target: Kejaksaan sudah memiliki Peraturan Teknis terkait dengan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Namun, berdasarkan Laporan verifikasi, IJRS belum melakukan kegiatan sosialisasi terkait dengan peraturan	Nilai: 100%

akomodasi yang layak bagi Disabilitas berhadapan dengan hukum	tersebut, hanya Kejaksaan RI saja yang melakukan sosialisasi, dan IJRS belum terlibat secara langsung. Dalam hal memperbaiki capaian, IJRS perlu untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan mengirimkan Data Dukung untuk yang menjadi bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi.	
	Proses Ko-kreasi Kejaksaan telah melakukan Ko-kreasi secara aktif dengan IJRS	Aktif
Ukuran Keberhasilan 2: Adanya monitoring dan evaluasi terhadap penanganan perempuan berhadapan dengan hukum di lembaga peradilan		
Kejaksaan Agung		
Target B06: Adanya diskusi awalan antara Kejaksaan dengan OMS terkait rencana monitoring dan evaluasi terhadap penanganan perempuan berhadapan dengan hukum di lembaga peradilan	Capaian Target: Belum ada diskusi tentang rencana monitoring dan evaluasi terhadap penanganan perempuan berhadapan dengan hukum di lembaga peradilan, karena fokus kerja sama antar Kejaksaan Agung dan OMS saat ini masih terkait isu disabilitas dan asistensi terhadap peningkatan kapasitas jaksa untuk sensitivitas gender. Pada tanggal 10 Juli 2023, telah dilaksanakan pertemuan konsultatif isu strategis akses keadilan di mana ukuran keberhasilan ini baru dikomunikasikan antar pihak, namun belum ada diskusi mengenai teknis pelaksanaan dan tindak lanjutnya.	Nilai: 50%
	Proses Ko-kreasi: Sudah ada upaya mengomunikasikan rencana melaksanakan ukuran keberhasilan ini pada pertemuan konsultatif akses	Semi-Aktif

	keadilan, namun belum secara substansial membahas mengenai capaian ukuran keberhasilan. Harapannya, pertemuan konsultatif atau rapat lainnya pasca periode B06 dapat dimanfaatkan dengan lebih optimal agar dapat terlaksana pembahasan lebih substansial atas capaian.	
Target B12: Adanya diskusi terkait alat ukur monitoring dan evaluasi terhadap penanganan perempuan berhadapan dengan hukum di lembaga peradilan	Capaian Target: Kejaksaan Agung mengumpulkan data dukung berupa rekapitulasi perkara tindak pidana umum di mana perempuan sebagai korban. Namun, diskusi mengenai alat ukur monitoring dan evaluasi bersama OMS belum terjadi. Diskusi akan diselenggarakan dengan fasilitasi Seknas OGI di bulan Februari 2024.	Nilai: 50%
	Proses Ko-kreasi: Belum terjadi diskusi dengan OMS untuk membahas alat ukur monitoring dan evaluasi terhadap penanganan perempuan berhadapan dengan hukum di lembaga peradilan.	Pasif
Target B18: Adanya diseminasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap penanganan perempuan berhadapan dengan hukum di lembaga peradilan	Capaian Target: Kejaksaan dan OMS telah melakukan Monitoring dan Evaluasi secara bersama-sama terkait perempuan berhadapan dengan hukum.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi Kejaksaan telah melakukan Ko-kreasi secara aktif dengan IJRS	Aktif
Mahkamah Agung		

Target B06: Adanya diskusi awalan antara MA dengan OMS terkait rencana monitoring dan evaluasi terhadap penanganan perempuan berhadapan dengan hukum di lembaga peradilan	Capaian Target: Mahkamah Agung dan OMS telah melakukan diskusi awalan mengenai latar belakang kegiatan monitoring dan evaluasi, kasus apa yang dapat dilakukan penilaian monitoring dan evaluasi, jenis data yang kira-kira dibutuhkan, dan tindak lanjut dari pertemuan.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Mahkamah Agung telah mengundang OMS dalam pertemuan pembahasan pada 6 Juli 2023 dan menghadiri rapat konsultatif kluster akses terhadap keadilan untuk pembahasan lanjutan pada 10 Juli 2023.	Aktif
Target B12: Adanya diskusi terkait alat ukur monitoring dan evaluasi terhadap penanganan perempuan berhadapan dengan hukum di lembaga peradilan	Capaian Target: Pada tanggal 16 November 2023, Mahkamah Agung dan OMS telah melakukan diskusi mengenai rencana pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi PerMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, alat ukur yang akan digunakan, dan ruang lingkup perkara untuk monitoring dan evaluasi tersebut. Ruang lingkup dari perkara yang akan dilakukan monitoring dan evaluasi implementasi PerMA Nomor 3 Tahun 2017 yakni perkara TPKS, perceraian, dan waris. Sebagai tindak lanjut, akan ada diskusi mendalam mengenai kerangka dan alat ukur dengan tim kecil dari Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI di Januari 2024.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Mahkamah Agung dan OMS telah melakukan ko-kreasi aktif dalam membuat rencana implementasi monitoring dan evaluasi PerMA	Aktif

	Nomor 3 Tahun 2017, antara lain melalui pelibatan aktif perwakilan OMS sebagai anggota dalam Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung.	
Target B18: Adanya diseminasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap penanganan perempuan berhadapan dengan hukum di lembaga peradilan	Capaian Target: MA telah melakukan Monitoring dan Evaluasi penanganan Perempuan berhadapan dengan hukum bersama dengan IJRS Proses Ko-kreasi Mahkamah Agung telah melakukan Ko-kreasi secara aktif dengan IJRS	Nilai: 100% Aktif
IJRS, PBHI, Asosiasi LBH APIK Indonesia		
Target B06: Adanya diskusi awalan antara Kejaksaan dan MA dengan OMS terkait rencana monitoring dan evaluasi terhadap penanganan perempuan berhadapan dengan hukum di lembaga peradilan	Capaian Target: Dengan MA, OMS sudah melakukan diskusi awalan dengan Biro Perencanaan, dan akan dilakukan pertemuan dengan Pokja Perempuan dan Anak (Pokja PA) di mana IJRS tergabung di dalamnya pada Agustus 2023. Ke depannya, perlu ada komunikasi antar Biro Perencanaan, Pokja PA, dan OMS untuk melakukan sinkronisasi pembahasan dan strategi untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Dengan Kejaksaan Agung, sudah ada upaya mengomunikasikan rencana melaksanakan ukuran keberhasilan ini pada pertemuan konsultatif akses keadilan, namun belum secara substansial membahas mengenai capaian ukuran keberhasilan. OMS juga telah membuat konsep alat ukur monitoring dan evaluasi, yang kedepannya	Nilai: 65%

	akan dimintakan masukan kepada Pokja PA MA dan Kejaksaan.	
	Proses Ko-kreasi: OMS telah mengupayakan diskusi antar Kejaksaan dan MA, meskipun diskusi dengan Kejaksaan untuk Ukuran Keberhasilan 2 Semester B06 saat ini masih di tahap pemberitahuan mengenai kegiatan dan belum membahas capaian secara substansial.	Semi-Aktif
Target B12: Adanya diskusi terkait alat ukur monitoring dan evaluasi terhadap penanganan perempuan berhadapan dengan hukum di lembaga peradilan	Capaian Target: Pada November 2023, IJRS dan Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung telah melakukan pertemuan untuk pembahasan terkait rencana monitoring dan evaluasi terkait Perma No. 3 Tahun 2017. Dalam pertemuan tersebut, telah dipaparkan rencana monitoring dan evaluasi, serta diperoleh masukan untuk penajaman konsep monitoring & evaluasi. Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah mendiskusikan kerangka dan alat ukur secara lebih mendalam dengan tim kecil dari Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI. Terkait dengan diskusi bersama Kejaksaan, OMS berencana mengatur pertemuan pada Februari 2024.	Nilai: 75%
	Proses Ko-kreasi: OMS dan Mahkamah Agung telah menjalankan ko-kreasi aktif pada B12. Ko-kreasi dengan Kejaksaan Agung belum terwujud pada B12 dan akan ditindaklanjuti pada awal B18.	Semi-Aktif

Target B18: Adanya diseminasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap penanganan perempuan berhadapan dengan hukum di lembaga peradilan	Capaian Target: Tidak ada laporan.	Nilai: N/A
	Proses Ko-kreasi: Tidak ada laporan	N/A
Ukuran Keberhasilan 3: Adanya evaluasi terhadap implementasi dari digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan		
Kejaksaaan Agung		
Target B06: Adanya diskusi awalan untuk membahas hasil kajian OMS terkait implementasi digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan	Capaian Target: Kejaksaaan Agung telah memberikan tanggapan terhadap pemaparan kajian OMS terkait implementasi digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Kejaksaaan Agung telah memberikan tanggapan terhadap hasil kajian OMS dalam pertemuan konsultatif isu strategis akses terhadap keadilan.	Aktif
Target B12: Adanya diskusi antara Kejaksaaan Agung dan OMS terkait usulan rekomendasi dan tindak lanjut perbaikan oleh APH berdasarkan temuan kajian OMS	Capaian Target: Pada bulan Juli, sudah ada rapat konsultatif untuk membahas implementasi komitmen akses terhadap keadilan, termasuk ukuran keberhasilan 3 komitmen 11. Ada beberapa poin tindak lanjut potensial yang dapat diangkat, namun belum ada pembahasan teknis lebih lanjut setelah pembahasan poin-poin tersebut.	Nilai: 30%

	Proses Ko-kreasi: Pasca pertemuan di bulan Juli, tidak ada komunikasi rutin lagi mengenai captain komitmen ini, sehingga ko-kreasi dinilai pasif.	Pasif
Target B18: Adanya pelaksanaan tindak lanjut dari hasil kajian OMS terkait implementasi digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan	Capaian Target: Kejaksaan telah mengadakan rapat koordinasi 19 Maret 2024 bersama dengan K/L terkait dan organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk membahas temuan hasil penelitian OMS tentang implementasi digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan. Kejaksaan juga telah menerbitkan Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 1 Tahun 2021 dan Nomor 2 Tahun 2023 yang berfokus pada akses keadilan bagi kelompok rentan, serta melaksanakan konsinyering teknis pada 8-10 Juli 2024 untuk membahas pengisian data perkara bagi penyandang disabilitas dalam aplikasi Case Management System (CMS).	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi Kejaksaan telah melakukan Ko-kreasi secara aktif dengan IJRS	Aktif
Kepolisian Republik Indonesia		
Target B06: Adanya diskusi awalan untuk membahas hasil kajian OMS terkait implementasi digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan	Capaian Target: Kepolisian RI telah terlibat dalam pembahasan awalan kajian OMS terkait implementasi digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan pada bulan Januari 2023.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi:	Aktif

	Kepolisian RI telah terlibat dalam pembahasan yang diinisiasi oleh OMS.	
Target B12: Adanya diskusi antara Kepolisian RI dan OMS terkait usulan rekomendasi dan tindak lanjut perbaikan oleh APH berdasarkan temuan kajian OMS	Capaian Target: Belum ada implementasi dari diskusi antara Kepolisian RI dan OMS mengenai usulan rekomendasi dan tindak lanjut perbaikan oleh APH berdasarkan hasil temuan kajian OMS.	Nilai: 0%
	Proses Ko-kreasi: Karena tidak ada diskusi yang diselenggarakan, ko-kreasi dinilai pasif.	Pasif
Target B18: Adanya pelaksanaan tindak lanjut dari hasil kajian OMS terkait implementasi digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan	Capaian Target: Tidak ada laporan.	Nilai: N/A
	Proses Ko-kreasi: Tidak ada laporan.	N/A
Mahkamah Agung		
Target B06: Adanya diskusi awalan untuk membahas hasil kajian OMS terkait implementasi digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan	Capaian Target: Mahkamah Agung telah menerima hasil kajian OMS dan memberikan tanggapan serta masukan atas kajian yang diterima.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Mahkamah Agung dan OMS telah menjalankan diskusi awalan terhadap hasil kajian OMS terkait implementasi digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan oleh Mahkamah Agung.	Aktif
Target B12:	Capaian Target:	Nilai: 30%

Adanya diskusi antara MA dan OMS terkait usulan rekomendasi dan tindak lanjut perbaikan oleh APH berdasarkan temuan kajian OMS	Pada bulan Juli, sudah ada rapat konsultatif untuk membahas implementasi komitmen akses terhadap keadilan, termasuk ukuran keberhasilan 3 komitmen 11. Ada beberapa poin tindak lanjut potensial yang dapat diangkat, namun belum ada pembahasan teknis lebih lanjut setelah pembahasan poin-poin tersebut.	
	Proses Ko-kreasi: Pasca pertemuan di bulan Juli, tidak ada komunikasi rutin lagi mengenai capaian komitmen ini, sehingga ko-kreasi dinilai pasif.	Pasif
Target B18: Adanya pelaksanaan tindak lanjut dari hasil kajian OMS terkait implementasi digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan	Capaian Target: IJRS perlu untuk segera menyampaikan hasil kajiannya kepada Mahkamah Agung untuk selanjutnya ditindaklanjuti Mahkamah Agung terkait dengan temuan dan hasil kajiannya.	Nilai: 50%
	Proses Ko-kreasi: IJRS perlu segera melakukan pemaparan hasil temuannya kepada Mahkamah Agung	Semi-Aktif
IJRS, PBHI, Asosiasi LBH APIK Indonesia		
Target B06: 1. Adanya diseminasi hasil kajian OMS terkait implementasi digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan	Capaian Target: OMS telah menyusun kajian berjudul "Kondisi Akses terhadap Keadilan untuk Perempuan dan Perempuan dari Kelompok Rentan Lain pada Masa Covid-19 di Indonesia", yang mencakup muatan mengenai implementasi digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan. Kajian ini lebih fokus terhadap Kepolisian RI dan Mahkamah Agung, namun juga memuat informasi umum mengenai penyelenggaraan proses peradilan digital	Nilai: 100%

2. Adanya diskusi awalan antara OMS dengan Kejaksaan, Kepolisian RI dan MA mengenai hasil kajian OMS terkait implementasi digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan	<p>oleh APH secara keseluruhan, termasuk Jaksa.</p> <p>Hasil kajian ini sudah diseminasikan dan telah ada diskusi awalan dengan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung pada rapat konsultatif di 10 Juli 2023, dan dengan Kepolisian secara terpisah pada bulan Januari.</p>	
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>Telah ada komunikasi antar pemangku kepentingan untuk pelaksanaan target capaian B06.</p>	Aktif
<p>Target B12:</p> <p>Adanya diskusi antara OMS dengan Kejaksaan, Kepolisian RI dan MA terkait usulan rekomendasi dan tindak lanjut perbaikan oleh APH berdasarkan temuan kajian OMS</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Pada bulan Juli, sudah ada rapat konsultatif untuk membahas implementasi komitmen akses terhadap keadilan, termasuk ukuran keberhasilan 3 komitmen 11. Ada beberapa poin tindak lanjut potensial yang dapat diangkat, namun belum ada pembahasan teknis lebih lanjut setelah pembahasan poin-poin tersebut.</p>	Nilai: 30%
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>Pasca pertemuan di bulan Juli, tidak ada komunikasi rutin lagi dengan Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung mengenai capaian komitmen ini. Selain itu, belum ada diskusi yang terjadi dengan Kepolisian RI pada B12.</p>	Pasif
<p>Target B18:</p> <p>Tidak ada target</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Tidak ada target</p>	<p>Nilai:</p> <p>Tidak ada target</p>

	Proses Ko-kreasi: Tidak ada target	Tidak ada target
Catatan Pelaksanaan: <ul style="list-style-type: none"> - Ko-kreasi antara Kejaksaan dengan IJRS telah terlaksana dengan baik. Selanjutnya Kejaksaan RI. Selanjutnya laporan hasil Monitoring dan Evaluasi yang berkaitan dengan aksesibilitas dan akuntabilitas proses peradilan di Indonesia perlu untuk dilengkapi dalam Monev B24. - IJRS perlu untuk melakukan diseminasi terkait dengan hasil Monitoring dan Evaluasinya kepada Mahkamah Agung, untuk selanjutnya masukan-masukan tersebut dapat diproses oleh Mahkamah Agung. 		

Komitmen 12

Perluasan Pemberian Bantuan Hukum yang Berkualitas dan Aksesibel di Indonesia

Ukuran Keberhasilan 1: Adanya keterlibatan masyarakat sipil dalam pembentukan Panduan Asistensi Penyusunan Standar Operasional (Stopela) Layanan Bantuan Hukum		
Badan Pembinaan Hukum Nasional		
Target B06: Adanya diskusi antara BPHN dan OMS dalam pembentukan Panduan Asistensi Penyusunan Standar Operasional (Stopela) Layanan Bantuan Hukum	Capaian Target: BPHN telah mengumpulkan data dukung berupa konsep Panduan Asistensi Penyusunan Standar Operasional (Stopela) Layanan Bantuan Hukum untuk bahan diskusi dengan OMS. Hal ini, beserta poin-poin yang BPHN ingin dapatkan masukan pada saat BPHN dan OMS nanti melakukan diskusi, telah dilaporkan dalam pertemuan konsultatif isu strategis akses terhadap keadilan pada tanggal 10 Juli 2023. Pada periode B06-B12, telah ada diskusi lanjutan mengenai pembentukan panduan asistensi penyusunan Stopela untuk PBH dan pemberian pelatihan bagi PBH untuk dapat melakukan penyusunan tersebut.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Diskusi sudah dilakukan oleh BPHN dan OMS	Aktif

Target B12: Adanya diskusi antara BPHN dan OMS dalam pembentukan Panduan Asistensi Penyusunan Standar Operasional (Stopela) Layanan Bantuan Hukum	Capaian Target: Telah dilakukan diskusi mengenai pembentukan Panduan Asistensi Penyusunan Stopela Layanan Bantuan Hukum dan sosialisasi Permenkumham No. 4 Tahun 2021 mengenai Starlabankum yang mewajibkan adanya penyusunan Stopela oleh PBH. Dari diskusi tersebut, salah satu tindak lanjut yang dibicarakan antara lain perlunya sosialisasi dan pelatihan yang lebih baik kepada OBH terlebih dahulu mengenai Starlabankum dan Stopela sebelum mewajibkan OBH menyusun Stopela. Hal tersebut akan ditindaklanjuti pada periode berikutnya.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Ko-kreasi dalam penyelenggaraan diskusi antara BPHN dan OMS berjalan dengan aktif.	Aktif
Target B18: Adanya draf awal Panduan Asistensi Penyusunan Standar Operasional (Stopela) Layanan Bantuan Hukum	Capaian Target: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah menyusun draf awal Panduan Asistensi Penyusunan Standar Operasional (Stopela) Layanan Bantuan Hukum. Draft ini merupakan hasil diskusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil seperti PBHI, IJRS, Asosiasi APIK, dan YLBHI.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: BPHN dalam menyusun draf awal Panduan Asistensi Stopela telah melibatkan berbagai macam OMS.	Aktif
IJRS, PBHI, Asosiasi LBH APIK Indonesia		

<p>Target B06:</p> <p>Adanya diskusi antara BPHN dan OMS dalam pembentukan Panduan Asistensi Penyusunan Standar Operasional (Stopela) Layanan Bantuan Hukum</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Pada periode B06-B12, telah ada diskusi lanjutan mengenai pembentukan panduan asistensi penyusunan Stopela untuk PBH dan pemberian pelatihan bagi PBH untuk dapat melakukan penyusunan tersebut.</p>	<p>Nilai: 100%</p>
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>Diskusi sudah dilakukan oleh BPHN dan OMS</p>	<p>Aktif</p>
<p>Target B12:</p> <p>Adanya diskusi antara BPHN dan OMS dalam pembentukan Panduan Asistensi Penyusunan Standar Operasional (Stopela) Layanan Bantuan Hukum</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Telah dilakukan diskusi mengenai pembentukan Panduan Asistensi Penyusunan Stopela Layanan Bantuan Hukum dan sosialisasi Permenkumham No. 4 Tahun 2021 mengenai Starlabankum yang mewajibkan adanya penyusunan Stopela oleh PBH.</p> <p>Dari diskusi tersebut, salah satu tindak lanjut yang dibicarakan antara lain perlunya sosialisasi dan pelatihan yang lebih baik kepada OBH terlebih dahulu mengenai Starlabankum dan Stopela sebelum mewajibkan OBH menyusun Stopela. Sehubungan dengan hal tersebut, OMS telah membuat Materi Ajar Pelatihan Standar Layanan Bantuan Hukum bagi Organisasi Bantuan Hukum terkait Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum.</p>	<p>Nilai: 100%</p>
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>Ko-kreasi dalam penyelenggaraan diskusi antara BPHN dan OMS berjalan dengan aktif.</p>	<p>Aktif</p>
	<p>Capaian Target:</p>	<p>Nilai: 100%</p>

Target B18: Adanya draf awal Panduan Asistensi Penyusunan Standar Operasional (Stopela) Layanan Bantuan Hukum	Pembahasan terkait Penyusunan Panduan Stopela sudah dilakukan dengan BPHN, Kanwil Kemenkumham dan OBH. Namun draft awal belum dilampirkan sebagai data dukung. Oleh sebab itu Draft Awal perlu segera disiapkan antara OMS dengan Pemerintah	
	Proses Ko-kreasi: IJRS, PBHI, dan LBH APIK telah berpartisipasi aktif terkait dengan penyusunan Stopela bantuan hukum.	Aktif
Ukuran Keberhasilan 2: Adanya pemetaan kebutuhan hukum masyarakat terhadap portal informasi terkait bantuan hukum.		
Badan Pembinaan Hukum Nasional		
Target B06: Adanya diskusi awalan antara BPHN dan OMS terkait rencana pemetaan kebutuhan hukum masyarakat terhadap portal informasi bantuan hukum	Capaian Target: BPHN telah terlibat dalam diskusi awalan yang diselenggarakan OMS bersama dengan MA, dan memberikan informasi mengenai portal informasi yang ada di BPHN (Legal Smart Channel, Sidbankum), tantangan, dan potensi perbaikan yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan informasi bantuan hukum masyarakat. BPHN juga telah melakukan pertemuan virtual dengan masyarakat sipil pelaksana komitmen untuk membahas pelaksanaan komitmen.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Telah ada diskusi awalan antar semua pelaksana komitmen, yang menghasilkan pemetaan umum terkait keadaan portal informasi bantuan hukum saat ini. Hal ini	Aktif

	akan ditindaklanjuti pada periode berikutnya untuk dapat memahami kebutuhan informasi bantuan hukum masyarakat dan potensi pengembangan portal secara lebih mendalam.	
Target B12: Tidak ada target	Capaian Target: -	Nilai: -
	Proses Ko-kreasi: -	
Target B18: Adanya diskusi antara BPHN dan OMS terkait usulan rekomendasi dan tindak lanjut berdasarkan kajian OMS terkait pemetaan kebutuhan hukum masyarakat terhadap portal informasi bantuan hukum	Capaian Target: BPHN telah mengadakan diskusi virtual tentang Portal Informasi Bantuan Hukum pada 22 November 2023. Acara ini dihadiri oleh berbagai OMS dan pihak terkait, termasuk PBHI, IJRS, Yayasan Tifa, dan perwakilan dari Mahkamah Agung. Diskusi ini memenuhi tujuan untuk membahas usulan dan rekomendasi terkait pemetaan kebutuhan hukum masyarakat terhadap portal informasi bantuan hukum. BPHN menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dalam mengoptimalkan portal online.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: BPHN telah melakukan diskusi dengan OMS terkait usulan tindak lanjut kajian OMS mengenai Portal Informasi Bantuan Hukum. Selain itu OMS juga telah membuat Portal Informasi Hukum untuk menjadi contoh pembuatan Portal Informasi Bantuan Hukum bagi BPHN	Aktif
Mahkamah Agung		
Target B06: Adanya diskusi awalan antara MA dan	Capaian Target: MA telah terlibat dalam diskusi awalan yang diselenggarakan OMS bersama dengan	Nilai: 100%

OMS terkait rencana pemetaan kebutuhan hukum masyarakat terhadap portal informasi bantuan hukum	BPHN, dan memberikan informasi mengenai portal informasi yang ada di MA (Posbakum), tantangan dan praktik baik dari pelaksanaan, dan potensi perbaikan yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan informasi bantuan hukum masyarakat.	
	Proses Ko-kreasi: Telah ada diskusi awalan antar semua pelaksana komitmen, yang menghasilkan pemetaan umum terkait keadaan portal informasi bantuan hukum saat ini. Hal ini akan ditindaklanjuti pada periode berikutnya untuk dapat memahami kebutuhan informasi bantuan hukum masyarakat dan potensi pengembangan portal secara lebih mendalam.	Aktif
Target B12: Tidak ada target	Capaian Target: -	Nilai: -
	Proses Ko-kreasi: -	
Target B18: Adanya diskusi antara MA dan OMS terkait usulan rekomendasi dan tindaklanjut berdasarkan kajian OMS terkait pemetaan kebutuhan hukum masyarakat terhadap portal informasi bantuan hukum	Capaian Target: Tidak ada laporan	Nilai: N/A
	Proses Ko-kreasi: Tidak ada laporan	N/A
IJRS, PBHI, Asosiasi LBH APIK Indonesia		
Target B06:	Capaian Target:	Nilai: 100%

Adanya diskusi awalan antara OMS dengan BPHN dan MA terkait rencana pemetaan kebutuhan hukum masyarakat terhadap portal informasi bantuan hukum	<p>Diskusi awalan telah dilakukan kepada MA dan BPHN untuk menjelaskan rencana kajian pemetaan kebutuhan terhadap informasi bantuan hukum di Mahkamah Agung dan BPHN. Diperoleh berbagai masukan terhadap rencana kajian termasuk temuan untuk menganalisa kebutuhan akan informasi bantuan hukum melalui portal yang ada (Posbakum, Legal Smart Channel, Sidbankum).</p> <p>Selanjutnya OMS akan melanjutkan proses kajian dengan melakukan wawancara mendalam kepada BPHN dan MA untuk menganalisis lebih lanjut kebutuhan terhadap informasi bantuan hukum oleh masyarakat.</p>	
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>Telah ada diskusi awalan antar semua pelaksana komitmen, yang menghasilkan pemetaan umum terkait keadaan portal informasi bantuan hukum saat ini. Hal ini akan ditindaklanjuti pada periode berikutnya untuk dapat memahami kebutuhan informasi bantuan hukum masyarakat dan potensi pengembangan portal secara lebih mendalam.</p>	Aktif
<p>Target B12:</p> <p>Adanya diseminasi awal dari OMS terhadap hasil kajian terkait pemetaan kebutuhan hukum masyarakat terhadap portal informasi bantuan hukum</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>OMS telah melakukan kajian mengenai kebutuhan masyarakat atas informasi bantuan hukum, dan mendiseminasikan temuan kajian kepada Mahkamah Agung dan BPHN. Diseminasi dan diskusi hasil kajian dilakukan sebanyak dua kali, yakni pada tanggal 15 November 2023 (untuk membahas temuan awal kajian) dan tanggal 22 November 2023 (untuk mendiseminasikan kajian yang telah dipublikasi kepada publik).</p>	Nilai: 100%

	<p>Diseminasi tanggal 15 November 2023 dihadiri oleh perwakilan Mahkamah Agung (Perwakilan Biro Perencanaan, Biro Humas, Badimiltun, Badilag dan Badilu), serta BPHN (Divisi Program Bantuan Hukum). Sementara, diseminasi tanggal 22 November 2023 yang dilakukan via Zoom menghadirkan perwakilan Biro Humas Mahkamah Agung dan perwakilan Divisi Program Bantuan Hukum BPHN sebagai Narasumber, beserta beberapa stakeholder relevan lainnya.</p>	
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>Target ini tercapai dengan ko-kreasi aktif antara OMS, BPHN dan Mahkamah Agung. Dalam penyusunan kajian dan pembahasannya, OMS aktif melibatkan BPHN dan Mahkamah Agung agar dapat menerima masukan atas riset yang dilakukan.</p>	Aktif
<p>Target B18:</p> <p>Adanya diskusi antara OMS dengan BPHN dan MA terkait usulan rekomendasi dan tindaklanjut berdasarkan kajian OMS terkait pemetaan kebutuhan hukum masyarakat terhadap portal informasi bantuan hukum</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Kajian telah dilakukan oleh IJRS, selain itu IJRS telah membangun portal Kata Hukum sebagai inisiatif untuk menyajikan Portal Bantuan Hukum yang dibutuhkan oleh Masyarakat. Namun diskusi dengan BPHN dan MA belum dilaksanakan dan baru akan dilakukan September. Oleh karena itu, target B18 tidak sempurna.</p>	Nilai: 51%
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>IJRS telah melakukan ko-kreasi melalui membangun Portal Kata Hukum sebagai model penyajian Informasi Bantuan hukum yang dibutuhkan.</p>	Aktif
<p>Tindak Lanjut B24:</p> <p>1. Ukuran Keberhasilan 1:</p>		

Perlu melampirkan draf awal untuk memastikan kebutuhan informasi hukum masyarakat teridentifikasi dengan tepat agar dapat memberikan bantuan hukum yang berkualitas.

2. Ukuran Keberhasilan 2:

MA perlu melengkapi Data Dukung dan memastikan bahwa diskusi antara IJRS, MA, dan BPHN yang akan dilaksanakan pada September dapat menghasilkan hasil diskusi yang berarti. Perlu juga memastikan pada B24 kolaborasi antara OMS dan K/L terlaksana dengan maksimal.

Komitmen 13

Penguatan Bantuan Hukum bagi Kelompok Rentan di Indonesia

Ukuran Keberhasilan 1: Adanya keterlibatan masyarakat sipil dalam pemetaan kebutuhan hukum kelompok rentan sebagai masukan untuk Rancangan UU Bantuan Hukum (RUU Bankum)		
Badan Pembinaan Hukum Nasional		
Target B06: Adanya diskusi antara BPHN dan OMS terkait usulan rekomendasi dan tindak lanjut berdasarkan kajian OMS terkait pemetaan kebutuhan hukum kelompok rentan	Capaian Target: Pasca pemetaan kebutuhan kelompok rentan oleh OMS pada 2022 dengan “Legal Needs Survey”, BPHN dan OMS telah melakukan diskusi lanjutan untuk usulan rekomendasi dan tindak lanjut berdasarkan temuan survei, antara lain pada Open Government Week 2023 di tanggal 10 Mei 2023. Selain itu, temuan dari survei dan hasil diskusi telah disampaikan oleh BPHN dalam rapat perancangan Naskah Akademik RUU Bantuan Hukum. Selain itu, BPHN bersama dengan OMS pelaksana komitmen melakukan riset asesmen standar anggaran bantuan hukum dengan memetakan kebutuhan penerima bantuan hukum dari kelompok rentan dan biaya di luar biaya perkara yang kerap dikeluarkan pencari keadilan. Untuk melaksanakan kegiatan ini, BPHN dan OMS telah melakukan diskusi serta kunjungan lapangan di Jakarta, Lampung, dan Nusa Tenggara Timur.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: BPHN dan OMS telah melakukan diskusi bersama untuk menindaklanjuti temuan mengenai kebutuhan hukum kelompok rentan serta kunjungan lapangan untuk	Aktif

	melakukan asesmen standar anggaran bantuan hukum.	
Target B12: Adanya diskusi antara BPHN dan OMS terkait usulan rekomendasi dan tindak lanjut berdasarkan kajian OMS terkait pemetaan kebutuhan hukum kelompok rentan	Capaian Target: Berdasarkan diskusi yang dilakukan oleh BPHN dan OMS sebagai tindak lanjut survei kebutuhan hukum kelompok rentan (2022), salah satu rekomendasi yang akan ditindaklanjuti bersama mengenai asesmen anggaran bantuan hukum yang berperspektif kelompok rentan. Pada periode B06-B12, OMS pelaksana RAN bersama dengan YLBHI menjalankan advokasi dan penelitian untuk mengetahui kebutuhan anggaran bantuan hukum bagi pemberian bantuan hukum untuk kelompok rentan. Hasil penelitian tersebut menjadi acuan untuk diskusi-diskusi perubahan anggaran bantuan hukum yang diupayakan oleh BPHN dan OMS, dan akan dibahas lebih lanjut di internal BPHN pasca B12.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: BPHN dan OMS telah melakukan diskusi dan kolaborasi aktif dalam menjalankan target, sehingga ko-kreasi dinilai aktif.	Aktif
Target B18: Adanya diskusi berkala antara BPHN dan OMS dalam rangka pemberian masukan terhadap proses penyusunan RUU Bankum	Capaian Target: BPHN dan OMS telah melaksanakan diskusi terkait muatan RUU Bantuan Hukum pada 28 Mei 2024, dengan fokus pada perluasan bantuan hukum bagi kelompok rentan. Diskusi ini merupakan langkah konkret dalam mencapai target adanya diskusi berkala antara kedua pihak untuk memberikan masukan terhadap proses penyusunan RUU Bankum.	Nilai: 100%

	Proses Ko-kreasi: BPHN telah melakukan Ko-kreasi dengan melibatkan OMS dalam pembahasan RUU Bantuan Hukum	Aktif
IJRS, PBHI, Asosiasi LBH APIK Indonesia		
Target B06: Adanya diskusi antara OMS dan BPHN terkait usulan rekomendasi dan tindak lanjut berdasarkan kajian OMS terkait pemetaan kebutuhan hukum kelompok rentan	Capaian Target: Pasca pemetaan kebutuhan kelompok rentan oleh OMS pada 2022 dengan “Legal Needs Survey”, BPHN dan OMS telah melakukan diskusi lanjutan untuk usulan rekomendasi dan tindak lanjut berdasarkan temuan survei, antara lain pada Open Government Week 2023 di tanggal 10 Mei 2023. Selain itu, OMS bersama BPHN melakukan koordinasi dan penyusunan ringkasan serta bahan yang dapat dibawa BPHN dalam pembahasan rapat lintas K/L untuk penyusunan RUU Bantuan Hukum. Selain itu, BPHN bersama dengan OMS pelaksana komitmen melakukan riset asesmen standar anggaran bantuan hukum dengan memetakan kebutuhan penerima bantuan hukum dari kelompok rentan dan biaya di luar biaya perkara yang kerap dikeluarkan pencari keadilan. Untuk melaksanakan kegiatan ini, BPHN dan OMS telah melakukan diskusi serta kunjungan lapangan di Jakarta, Lampung, dan Nusa Tenggara Timur.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: BPHN dan OMS telah melakukan diskusi bersama untuk menindaklanjuti temuan mengenai kebutuhan hukum kelompok rentan serta kunjungan lapangan untuk	Aktif

	melakukan asesmen standar anggaran bantuan hukum.	
Target B12: Adanya diskusi antara BPHN dan OMS terkait usulan rekomendasi dan tindak lanjut berdasarkan kajian OMS terkait pemetaan kebutuhan hukum kelompok rentan	Capaian Target: Berdasarkan diskusi yang dilakukan oleh BPHN dan OMS sebagai tindak lanjut survei kebutuhan hukum kelompok rentan (2022), salah satu rekomendasi yang akan ditindaklanjuti bersama mengenai asesmen anggaran bantuan hukum yang berperspektif kelompok rentan. Pada periode B06-B12, OMS pelaksana RAN bersama dengan YLBHI menjalankan advokasi dan penelitian untuk mengetahui kebutuhan anggaran bantuan hukum bagi pemberian bantuan hukum untuk kelompok rentan. Hasil penelitian tersebut menjadi acuan untuk diskusi-diskusi perubahan anggaran bantuan hukum yang diupayakan oleh BPHN dan OMS, dan akan dibahas lebih lanjut di internal BPHN pasca B12. Berdasarkan temuan kajian OMS, selain perlunya peningkatan anggaran, juga perlu ada perhatian khusus mengenai anggaran untuk mengakomodasi kebutuhan afirmasi/dukungan khusus yang belum masuk di anggaran lainnya, serta penguatan untuk anggaran non-litigasi dan pendampingan korban.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: BPHN dan OMS telah melakukan diskusi dan kolaborasi aktif dalam menjalankan target, sehingga ko-kreasi dinilai aktif.	Aktif
Target B18:	Capaian Target: 1. IJRS bersama dengan Koalisi Masyarakat Sipil telah mengirimkan	Nilai: 100%

Adanya diskusi berkala antara BPHN dan OMS dalam rangka pemberian masukan terhadap proses penyusunan RUU Bankum	<p>Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait dengan RUU Bantuan Hukum kepada BPHN</p> <p>2. PBHI dan IJRS telah melaksanakan diskusi bersama dengan BPHN terkait dengan RUU Bantuan Hukum. Kegiatan ini juga melibatkan berbagai LBH untuk mendorong masukan publik yang lebih akurat terkait dengan urgensi RUU Bankum. Namun sampai saat ini, RUU Bankum belum menjadi Prioritas DPR</p>	
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>OMS telah terlibat secara aktif untuk memberikan masukan dalam bentuk DIM terkait dengan RUU Bantuan Hukum</p>	Aktif
<p>Ukuran Keberhasilan 2:</p> <p>Adanya penguatan kapasitas pemberi bantuan hukum (PBH) untuk kelompok rentan</p>		
Badan Pembinaan Hukum Nasional		
<p>Target B06:</p> <p>Adanya diskusi antara BPHN dengan OMS terkait rencana penguatan kapasitas PBH bagi kelompok rentan</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>BPHN telah melakukan diskusi peningkatan kapasitas PBH dengan OMS lain, yakni LBH APIK Papua dalam Kegiatan Pelatihan Paralegal Kampung Asei Kecil dan Kampung Nolakla Program Memperbaiki Akses Pada Layanan Hukum dan Sosial Bagi Perempuan (BERDAYA) di Papua tanggal 8 Februari 2023. BPHN juga telah membuat modul pelatihan paralegal bantuan hukum tanggal 10 April 2023 dan 7 Juni 2023.</p> <p>Namun, diskusi belum dapat terlaksana antar BPHN dengan OMS pelaksana komitmen (IJRS, PBHI, Asosiasi LBH APIK Indonesia) karena OMS pelaksana masih sedang mengupayakan pendanaan dan menyusun</p>	Nilai: 100%

	rencana untuk kegiatan penguatan bantuan hukum.	
	Proses Ko-kreasi: Untuk target ini, BPHN telah melakukan ko-kreasi dengan beberapa PBH dan OMS, meskipun bukan dengan OMS pelaksana komitmen.	Aktif
Target B12: Adanya diskusi antara BPHN dengan OMS terkait rencana penguatan kapasitas PBH bagi kelompok rentan	Capaian Target: BPHN dan OMS telah melakukan diskusi mengenai rencana penguatan kapasitas PBH untuk memberikan pelayanan bagi kelompok rentan dan membahas muatan panduan pelatihan yang nanti akan dibawakan. Diskusi dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2023 di Hotel Aloft Wahid Hasyim Jakarta dan mengundang perwakilan PBH, beberapa pakar di bidang GEDSI, dan Setnas OGI. Pelatihan yang akan dibawakan bagi PBH berkaitan dengan pemberian layanan kepada kelompok rentan sesuai dengan Starlabankum yang diatur dalam Permenkumham No. 4 Tahun 2021, dan untuk melakukan penyusunan Standar Operasional Layanan Bantuan Hukum.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: BPHN dan OMS telah melakukan diskusi mengenai rencana penyelenggaraan pelatihan PBH, yang berhasil menghasilkan panduan pelatihan. Karena masing-masing pihak berkontribusi secara bermakna dalam diskusi, ko-kreasi dinilai aktif.	Aktif
Target B18: Adanya pemberian	Capaian Target: BPHN telah memberikan masukan terhadap kurikulum dan materi sosialisasi untuk	Nilai: 100%

masukan dari BPHN terhadap kurikulum dan materi sosialisasi untuk penguatan kapasitas PBH bagi kelompok rentan	penguatan kapasitas PBH bagi kelompok rentan. Prosesnya dimulai dengan FGD bersama OMS (IJRS, PBHI, Asosiasi Apik, YLBHI) pada 17 Oktober 2023 di Jakarta, membahas Draft Outline Pedoman Pelatihan. Masukan BPHN diwujudkan dalam “Pedoman Standar Layanan Bantuan Hukum bagi Organisasi Bantuan Hukum terkait Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum”, yang finalisasinya selesai pada 5 Februari 2024. Dengan ini, BPHN telah berkontribusi secara efektif dalam pengembangan pedoman melalui kolaborasi dengan OMS.	
	Proses Ko-kreasi: BPHN telah memberikan masukan kepada OMS penyusun terkait dengan kurikulum dan materi sosialisasi penguatan kapasitas PBH bagi kelompok rentan	Aktif
IJRS, PBHI, Asosiasi LBH APIK Indonesia		
Target B06: Adanya diskusi antara BPHN dengan OMS terkait rencana penguatan kapasitas PBH bagi kelompok rentan	Capaian Target: Diskusi belum dapat terlaksana pada B06 karena OMS pelaksana komitmen masih mengupayakan pendanaan untuk melaksanakan Ukuran Keberhasilan 2 pada Komitmen 13.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Ko-kreasi belum terlaksana pada B06 karena target belum dijalankan.	Aktif
Target B12: Adanya diskusi antara BPHN dengan OMS terkait rencana penguatan kapasitas	Capaian Target: BPHN dan OMS telah melakukan diskusi mengenai rencana penguatan kapasitas PBH untuk memberikan pelayanan bagi kelompok rentan dan membahas muatan panduan	Nilai: 100%

PBH bagi kelompok rentan	<p>pelatihan yang nanti akan dibawakan. Diskusi dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2023 di Hotel Aloft Wahid Hasyim Jakarta dan mengundang perwakilan PBH, beberapa pakar di bidang GEDSI, dan Setnas OGI.</p> <p>Pelatihan yang akan dibawakan bagi PBH berkaitan dengan pemberian layanan kepada kelompok rentan sesuai dengan Starlabankum yang diatur dalam Permenkumham No. 4 Tahun 2021, dan untuk melakukan penyusunan Standar Operasional Layanan Bantuan Hukum.</p>	
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>BPHN dan OMS telah melakukan diskusi mengenai rencana penyelenggaraan pelatihan PBH, yang berhasil menghasilkan panduan pelatihan. Karena masing-masing pihak berkontribusi secara bermakna dalam diskusi, ko-kreasi dinilai aktif.</p>	Aktif
<p>Target B18:</p> <p>Adanya kurikulum dan materi sosialisasi untuk penguatan kapasitas PBH bagi kelompok rentan yang diberi masukan oleh BPHN</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>IJRS telah terlibat aktif untuk memberikan masukan terkait kurikulum terkait Bantuan Hukum untuk kelompok rentan</p>	<p>Nilai:</p> <p>100%</p>
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>IJRS telah melibatkan secara aktif unsur pemerintah dalam pemberian masukan kurikulum terkait Bantuan untuk kelompok rentan</p>	Aktif
<p>Tindak Lanjut B24:</p> <p>1. Ukuran Keberhasilan 1: IJRS bersama PBHI dan BPHN perlu untuk melakukan diskusi secara berkala terkait dengan masukan substansi dalam draft RUU Bantuan Hukum yang saat ini sedang disusun. BPHN diharapkan dapat berkoordinasi secara berkala kepada masyarakat sipil mengenai tahapan dan perkembangan penyusunan RUU Bantuan Hukum</p>		

2. Ukuran Keberhasilan 2: Perlu dipastikan keterlibatan masing-masing pemangku kepentingan (OMS dan Kemenkumham) untuk berpartisipasi aktif dalam penguatan kapasitas pemberi bantuan hukum untuk kelompok rentan

Komitmen 14

Penguatan Mekanisme Pemulihan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Ukuran Keberhasilan 1: Tersedianya peraturan turunan terkait Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai peraturan turunan dari UU TPKS yang disusun dengan pelibatan masyarakat sipil		
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Target B06: Terlaksananya penyusunan draf peraturan turunan terkait UPTD PPA dengan masukan dari masyarakat sipil	Capaian Target: Kementerian PPPA sudah melakukan penyusunan draf peraturan turunan terkait UPTD PPA.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: KemenPPPA sudah melaksanakan forum konsultasi publik yang mengundang beberapa masyarakat sipil, termasuk INFID. Ke depannya, ko-kreasi dapat dimaksimalkan agar mitra masyarakat sipil yang dilibatkan dalam diskusi juga bisa mendapatkan update mengenai perkembangan penyusunan peraturan turunan UPTD PPA. KemenPPPA juga dapat menghadiri pertemuan koordinasi yang diselenggarakan OGI agar mitra pelaksana komitmen dapat saling meng-update kemajuan pelaksanaan komitmen dan mendiskusikan tindak lanjut ko-kreasi.	Semi-Aktif
Target B12: Tersedianya peraturan turunan terkait UPTD PPA yang telah disusun	Capaian Target: Tidak mengumpulkan data dukung (Data dukung ditunggu sampai dengan H+7 Multistakeholder Forum II)	Nilai: 0%

dengan masukan dari masyarakat sipil	Proses Ko-kreasi: Tidak mengumpulkan data dukung (Data dukung ditunggu sampai dengan H+7 Multistakeholder Forum II)	Pasif
Target B18: Tidak ada target	Capaian Target: Tidak ada target	Nilai: Tidak ada target
	Prose Ko-kreasi: Tidak ada target	Tidak ada target
International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)		
Target B06: Terlaksananya pengumpulan data persepsi warga dan operasionalisasi UU TPKS untuk mendukung penyusunan draf peraturan turunan mengenai UPTD PPA	Capaian Target: INFID telah menyusun Laporan Penelitian Needs Assessment: Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasional Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan <i>Policy Paper</i> mengenai konsepsi UPTD PPA dan peraturan turunannya.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: INFID telah berupaya menginisiasi pertemuan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), antara lain audiensi pada 2 Februari 2023 dan penyelenggaraan diskusi di Open Government Week 2023 untuk membahas substansi yang dapat mendukung peraturan turunan UPTD PPA. Namun, INFID melaporkan beberapa tantangan dalam memulai komunikasi awalan dengan Kementerian PPPA.	Semi-aktif

Target B12: Tersedianya kajian mengenai implementasi UU TPKS, khususnya terkait UPTD PPA untuk mendukung penyusunan draf peraturan turunan mengenai UPTD PPA	Capaian Target: INFID sudah membuat policy paper mengenai UPTD PPA dan kajian Needs Assessment yang dapat membantu penyusunan draf peraturan turunan mengenai UPTD PPA.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Pada periode B12, tidak ada ko-kreasi yang terjalin antar KemenPPPA dengan INFID, sehingga mendapatkan nilai pasif.	Pasif
Target B18: Tidak ada target	Capaian Target: Tidak ada target	Nilai: Tidak ada target
	Proses Ko-kreasi: Tidak ada target	Tidak ada target
Ukuran Keberhasilan 2: Terlaksananya perbaikan tata kelola UPTD PPA serta perluasan cakupan dan penerima manfaat UPTD PPA		
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Target B06: Tidak ada target B06	Capaian Target: Tidak ada target	Nilai: Tidak ada target
	Proses Ko-kreasi: Tidak ada target	Tidak ada target
Target B12: Tersedianya desain	Capaian Target: Tidak mengumpulkan data dukung	Nilai: 0%

awal untuk standar penerapan UPTD PPA sesuai peraturan turunan dan masukan masyarakat luas	Proses Ko-kreasi: Tidak mengumpulkan data dukung	Pasif
Target B18: Terlaksananya perbaikan tata kelola UPTD PPA sesuai peraturan turunan dan masukan masyarakat luas	Capaian Target: Tidak ada laporan.	Nilai: N/A
	Proses Ko-kreasi: Tidak ada laporan.	N/A
International NGO Forum on Indonesian Development		
Target B06: Tidak ada target B06	Capaian Target: Tidak ada target	Nilai: Tidak ada target
	Proses Ko-kreasi: Tidak ada target	Tidak ada target
Target B12: Tersedianya kajian terkait UPTD PPA, termasuk untuk masukan proses perbaikan tata kelola UPTD PPA	Capaian Target: INFID sudah membuat policy paper mengenai UPTD PPA dan needs assessment. Namun, kajian yang dibuat tidak memuat substansi mengenai usulan perbaikan tata kelola UPTD PPA.	Nilai: 50%
	Proses Ko-kreasi: Pada periode B12, tidak ada ko-kreasi yang terjalin antar KemenPPPA dengan INFID, sehingga mendapatkan nilai pasif.	Pasif

Target B18: Adanya keterlibatan masyarakat sipil dalam pemberian masukan terhadap proses perbaikan tata kelola UPTD PPA	Capaian Target: INFID telah memberikan masukan terhadap peraturan turunan terkait UPTD PPA, dan juga DBK. Masukan perlu ditindaklanjuti Kemen PPPA	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: INFID telah berupaya untuk melaksanakan ko-kreasi dengan Kemen PPPA. Namun hasil dari ko-kreasi pemberian masukan tidak dapat tercerminkan dalam laporan Kemen PPPA	Aktif
Ukuran keberhasilan 3: Tersedianya peraturan turunan terkait Dana Bantuan Korban (DBK) sebagai peraturan turunan dari UU TPKS		
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)		
Target B06: 1. Terlaksananya kepesertaan LPSK sebagai lembaga pengusul dan pengampu dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan PP (RPP) DBK 2. Terlaksananya konsultasi publik pembahasan RPP DBK	Capaian Target: 1. LPSK telah melakukan rangkaian rapat penyusunan dan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM selaku pemrakarsa RPP DBK pada bulan Februari sampai dengan Juni 2023, termasuk Rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) dengan LPSK sebagai anggota PAK untuk membahas RPP DBK TPKS pada tanggal 7 Juni 2023. 2. LPSK telah menjelaskan gambaran perkembangan pembahasan RPP DBK pada rapat yang diinisiasi oleh Kementerian PPPA pada tanggal 20 Maret 2023, dan menyelenggarakan diskusi publik pada tanggal 27 Juni 2023.	Nilai: 100%

	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>LPSK telah menjalankan berbagai upaya ko-kreasi, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bertemu dengan jaringan masyarakat sipil dalam rangka menjelaskan gambaran perkembangan pembahasan RPP DBK melalui pertemuan yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada 20 Maret 2023. • Berpartisipasi sebagai narasumber dalam Open Government Week 2023 di diskusi panel yang mengangkat tema “Penguatan Mekanisme Pemulihan dalam UU TPKS: Mendorong DBK dan UPTD PPA” pada 11 Mei 2023 • Menyenggarakan diskusi publik dengan mengundang K/L terkait dan organisasi masyarakat sipil bertempat di Kantor LPSK pada tanggal 27 Juni 2023. 	Aktif
<p>Target B12:</p> <p>1. Terlaksananya kepesertaan LPSK sebagai lembaga pengusul dan pengampu dalam pembahasan RPP DBK pada tahap harmonisasi</p> <p>2. Terlaksananya koordinasi K/L dalam proses pemberian persetujuan RPP DBK</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>1. LPSK sebagai pengusul dan pengampu muatan RPP DBK telah terlibat dalam rapat pembahasan Panitia Antar Kementerian (PAK) RPP DBK yang dilakukan sebanyak 5 (lima) kali rapat pada bulan Agustus s.d. Desember yang dihadiri oleh anggota PAK yaitu Mahkamah Agung, Kemenkopolhukam, Kemensetneg, KemenPPPA, Kemenkeu, Kemensos, Kementerian Agama, Kejaksaan RI, Kepolisian RI, Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI dan Kemenkumham.</p> <p>2. Telah terlaksana koordinasi antar K/L terkait mengenai muatan RPP DBK, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi trilateral antara LPSK, Kemenkumham dan Kemenkeu dengan 	Nilai: 100%

	<p>pembahasan substansi mekanisme hibah dalam RPP DBK pada tanggal 12 Juli 2023.</p> <p>- Koordinasi bilateral antara LPSK dengan Kemenkumham dengan pembahasan substansi mekanisme pemberian DBK pada tanggal 18 September 2023.</p> <p>- Koordinasi antara LPSK, Mahkamah Agung, Kejaksaan serta Kemenkumham dengan pembahasan substansi mekanisme pemberian DBK pada tanggal 11 Oktober 2023.</p> <p>- Koordinasi LPSK bersama KemenPPPA, Kemenkeu, Kemensos, Kemenkes, Komnas Perempuan serta kemenkumham terkait pengaturan pendanaan layanan pemulihan korban TPKS pada tanggal 14 November 2023.</p>	
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>Fokus dari capaian LPSK untuk semester B12 adalah koordinasi antar K/L terkait. Namun, LPSK juga telah berinisiatif mengadakan diskusi publik yang mengundang beberapa perwakilan OMS untuk membahas muatan RPP DBK. Selain itu, LPSK juga turut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh OMS pelaksana Komitmen 14 seperti FGD, sehingga tetap melakukan ko-kreasi dengan masyarakat untuk perbaikan muatan RPP DBK.</p>	Aktif
<p>Target B18:</p> <p>Tersusunnya draf hasil PAK dan selesainya proses</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>LPSK telah menyusun draft hasil PAK terkait dengan RPP DBK</p>	<p>Nilai:</p> <p>100%</p>
	<p>Proses Ko-kreasi:</p>	Semi-Aktif

harmonisasi terhadap draf	LPSK selaku pengampu penyusunan peraturan turunan terkait DBK telah mengirimkan permohonan masukan kepada INFID terkait dengan RPP DBK	
Kementerian Hukum dan HAM		
Target B06: 1. Tercantumnya usulan draf dalam kerangka regulasi perencanaan 2. Tersusunnya konsepsi draf yang telah teruji kelayakan konsepsi draf	Capaian Target: 1. Usulan RPP DBK TPKS telah dicantumkan dalam Program Penyusunan Peraturan Pemerintah tahun 2023, dengan Kementerian Hukum dan HAM sebagai pemrakarsa. 2. Telah tersusun konsep RPP DBK TPKS per Juni 2023, dan telah dilaksanakan Rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) pada 7 Juni 2023.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Kementerian Hukum dan HAM belum melaksanakan ko-kreasi, karena tahap pembahasan RPP DBK masih di Rapat PAK, sehingga belum dapat melibatkan masyarakat. Namun, LPSK sebagai salah satu Lembaga yang terlibat dalam penyusunan RPP DBK TPKS telah melakukan diskusi dan penjaringan masukan dari masyarakat sipil untuk mendukung muatan.	N/A
Target B12: Terselenggaranya sosialisasi draf dalam rangka pelibatan publik secara luas	Capaian Target: Telah diselenggarakan diskusi yang mengundang perwakilan masyarakat sipil dalam rangka pelibatan publik untuk mendapatkan masukan atas muatan RPP DBK. Perwakilan yang diundang antara lain IJRS, MaPPI FH UI, LeIP, Yayasan Sukma, ICJR, INFID, FPL, dan Jaringan Masyarakat	Nilai: 100%

	Sipil/CSO (JMS) yang bergerak di bidang GEDSI.	
	Proses Ko-kreasi: K/L telah melibatkan OMS dalam pemberian masukan atas muatan RPP DBK melalui kegiatan diskusi yang diselenggarakan.	Aktif
Target B18: Tersusunnya draf hasil PAK dan selesaiannya proses harmonisasi terhadap draf	Capaian Target: Draft PAK RPP tentang DBK TPKS telah tersusun dan disepakati	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi:	Aktif
Indonesia Judicial Research Society (IJRS), International NGO Forum on Indonesian Development		
Target B06: 1. Terlaksananya penyusunan kajian terkait DBK untuk mendukung penyusunan draf peraturan turunan terkait DBK 2. Terlibatnya masyarakat sipil dalam konsultasi publik pembahasan RPP DBK	Capaian Target: IJRS dan INFID telah melakukan penyusunan kajian terkait DBK untuk mendukung penyusunan draf peraturan turunan terkait DBK. IJRS dan INFID juga telah terlibat dalam Diskusi Publik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dana Bantuan Korban (RPP DBK) pada 27 Juni 2023 yang diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta menyelenggarakan Side Event pada Open Government Week 2023 yang mengundang Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi:	Aktif

	OMS telah melakukan ko-kreasi dalam melaksanakan capaian, antara lain melalui partisipasi dalam diskusi pembahasan muatan untuk mendukung peraturan turunan mengenai DBK.	
Target B12: 1. Tersedianya kajian terkait DBK untuk mendukung penyusunan draf peraturan turunan terkait DBK 2. Terlibatnya masyarakat sipil dalam sosialisasi draf dalam rangka pelibatan publik secara luas	Capaian Target: 1. INFID telah membuat policy paper mengenai RPP DBK yang juga telah disampaikan kepada LPSK. Selain itu, IJRS sedang melakukan proses penyusunan kajian lebih komprehensif mengenai DBK yang dapat dijadikan acuan tidak hanya dalam penyusunan muatan RPP DBK, namun juga untuk implementasi skema DBK ke depannya. Pada B06-B12, IJRS telah mengontrak beberapa tenaga ahli untuk menulis kajian dan telah membuat kerangka kajian di Desember 2023. Kajian diperkirakan akan selesai pada tahun 2024. Untuk mendukung penyusunan kajian dan mengetahui kemajuan pembahasan dan penyusunan muatan RPP DBK, IJRS telah mengundang LPSK dalam FGD pada 12 Oktober 2023. 2. INFID dan IJRS telah diundang dan terlibat dalam Rapat Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh LPSK pada tanggal 27 Juni 2023 untuk membahas muatan RPP DBK.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Dalam pencapaian target ini, OMS telah melakukan FGD bersama LPSK untuk menggali perkembangan RPP DBK lebih lanjut, yang berguna untuk mengembangkan kajian yang sedang disusun. OMS juga telah terlibat dalam kegiatan diskusi publik yang	Aktif

	diselenggarakan LPSK dalam rangka sosialisasi draf dan mendapatkan masukan atas muatan RPP DBK.	
Target B18: Tidak ada target	Capaian Target: Tidak ada target	Nilai: Tidak ada target
	Proses Ko-kreasi: Tidak ada target	Tidak ada target
Catatan Pelaksanaan: <ol style="list-style-type: none"> Ukuran Keberhasilan 2: INFID dan Kementerian PPPA perlu melaksanakan koordinasi dan Ko-kreasi yang lebih aktif, dikarenakan tidak tercerminkannya Ko-kreasi antara kedua pihak dalam Laporan Monev B18. Sekretariat OGI akan memfasilitasi pertemuan untuk melakukan klarifikasi terhadap Capaian Target yang dilaksanakan Ukuran Keberhasilan 3: LPSK dan Kementerian Hukum dan HAM perlu untuk segera menyelesaikan Draft Peraturan Turunan terkait dengan Dana Bantuan Korban (DBK). Dalam pencapaian Target B24, perlu dipastikan keterlibatan OMS sampai dengan draft final yang akan diajukan kepada Presiden. 		

Komitmen 15

Pengembangan Keterbukaan Data SDA-LH dan Tata Ruang

Ukuran Keberhasilan 1: Penyusunan data prioritas sektor SDA-LH yang partisipatif		
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional		
Target B06: Penyusunan daftar data prioritas di sektor lingkungan hidup dan SDA	Capaian Target: Penyusunan Daftar Data Prioritas akan dilakukan di Semester 2	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Penyusunan Daftar Data Prioritas akan dilakukan di Semester 2	Aktif
Target B12: Penyusunan daftar data prioritas di sektor lingkungan hidup dan SDA	Capaian Target: Penyusunan Usulan Daftar Data Prioritas 2024 telah diberikan kepada Sekretariat SDI melalui usulan Dit. ANTB Kementerian PPN/Bappenas	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Proses Penyusunan Data telah dilakukan secara ko-kreasi antara Setnas OGI dengan OMS	Aktif
Target B18: Penyusunan standar verifikasi data dari hasil pertukaran data	Capaian Target: Tidak ada laporan.	Nilai: N/A
	Proses Ko-kreasi: Tidak ada laporan.	N/A

Indonesian Center for Environmental Law, Publish What You Pay		
Target B06: 1. Kajian urgensi dibentuknya gugus tematik satu data SDA & LH 2. Kajian data prioritas SDA & LH	Capaian Target: Data dukung terkait kajian Urgensi telah telah dikirimkan pada Semester II	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Kajian dilakukan hanya oleh CSO, belum dilakukan partisipatif dengan K/L terkait	Pasif
Target B12: Penyusunan kajian terkait pertukaran dan integrasi data di seluruh K/L/D	Capaian Target: ICEL dengan Auriga dan PWYP telah menyusun kajian terkait Dasar hukum untuk Usulan Daftar Data Prioritas 2024 untuk diusulkan kepada Sekretariat OGI dan masuk dalam Usulan Daftar Data Prioritas 2024	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Usulan daftar data prioritas dikerjakan oleh satu pihak CSO dengan telah dilakukan diskusi dengan Sekretariat OGI	Semi-Aktif
Target B18: Kajian integrasi, pertukaran data, dan verifikasi data SDA & LH	Capaian Target: Tidak ada laporan.	Nilai: N/A
	Proses Ko-kreasi: Tidak ada laporan.	N/A
Ukuran Keberhasilan 2: Pemetaan internal dalam K/L/D tentang masalah tata kelola Satu Data Sektor SDA-LH		
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional		

Target B06: Penyusunan pemetaan internal dalam K/L/D tentang masalah tata kelola Satu Data Sektor LH-SDA	Capaian Target: Tidak mengumpulkan data dukung (Data dukung ditunggu sampai dengan H+7 Multistakeholder Forum II)	Nilai: 0%
	Proses Ko-kreasi: Tidak mengumpulkan data dukung (Data dukung ditunggu sampai dengan H+7 Multistakeholder Forum II)	Pasif
Target B12: Forum Koordinasi kebutuhan Data Prioritas Sektor SDHLH, yang melibatkan OMS	Capaian Target: Telah dilakukan rapat koordinasi dengan OMS dan Sekretariat SDI. Proses komunikasi Usulan Daftar Data Prioritas telah difasilitasi Sekretariat OGI	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Proses Ko-kreasi belum dilaksanakan secara aktif, perlu dukungan dan penjemabatan dari Sekretariat OGI	Semi-Aktif
Target B18: Forum Koordinasi kebutuhan Data Prioritas Sektor SDH-LH, yang melibatkan OMS	Capaian Target: Tidak ada target	Nilai: Tidak ada target
	Proses Ko-kreasi: Tidak ada target	Tidak ada target
ICEL, Media Link, PWYP Indonesia, Auriga Nusantara		
Target B06: Penyelenggaraan diskusi kelompok terpumpun antara CSO dengan masing-	Capaian Target: Tidak mengumpulkan data dukung (Data dukung ditunggu sampai dengan H+7 Multistakeholder Forum II)	Nilai: 0%

masing K/L/D untuk memetakan potensi dan tantangan pelaksanaan Satu Data Sektor LH-SDA	Proses Ko-kreasi: Tidak mengumpulkan data dukung (Data dukung ditunggu sampai dengan H+7 Multistakeholder Forum II)	Pasif
Target B12: Penyusunan kertas kebijakan terkait usulan potensi dan tantangan pelaksanaan satu data sektor SDA-LH SDA	Capaian Target: ICEL dengan Auriga dan PWYP telah menyusun kajian terkait Dasar hukum untuk Usulan Daftar Data Prioritas 2024 untuk diusulkan kepada Sekretariat OGI dan masuk dalam Usulan Daftar Data Prioritas 2024	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Belum terdapat ko-kreasi antar K/L dalam menyusun kertas kebijakan	Pasif
Target B18: Tidak ada target	Capaian Target: Tidak ada target	Nilai: Tidak ada target
	Proses Ko-kreasi: Tidak ada target	Tidak ada target
Ukuran Keberhasilan 3: Penyelenggaraan forum satu data di sektor SDA-LH untuk persiapan data prioritas dan standar data, dan publikasi di portal data		
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional		

Target B06:	Capaian Target: Tidak ada target	Nilai: Tidak ada target
	Proses Ko-kreasi: Tidak ada target	Tidak ada target
Target B12: Penyelenggaraan pra-forum data LHSDA antara KLHK dan Pemerintah Daerah Piloting	Capaian Target: Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Sekretraiat SDI, K/L terkait, dan OMS, Usulan Data dilakukan melalui Direktorat ANTB kepada Pusat Data dan Informasi Bappenas	Nilai: N/A
	Proses Ko-kreasi: N/A	N/A
Target B18: Penyelenggaraan pra-forum data LHSDA antara KLHK dan Pemerintah Daerah Piloting	Capaian Target: Tidak ada laporan	Nilai: N/A
	Proses Ko-kreasi: Tidak ada laporan	N/A
ICEL, Media Link, PWYP Indonesia, Auriga Nusantara		
Target B06:	Capaian Target: Tidak ada target	Nilai: Tidak ada target
	Proses Ko-kreasi: Tidak ada target	Tidak ada target
Target B12:	Capaian Target:	Nilai: 100%

Diseminasi kertas kebijakan terkait potensi dan tantangan satu data di sektor LH-SDA sebagai rekomendasi dalam forum satu data di sektor lingkungan hidup SDA	ICEL dengan Auriga dan PWYP telah menyusun kajian terkait Dasar hukum untuk Usulan Daftar Data Prioritas 2024 untuk diusulkan kepada Sekretariat OGI dan masuk dalam Usulan Daftar Data Prioritas 2024	
	Proses Ko-kreasi: Belum terdapat ko-kreasi dalam penyusunan diseminasi kertas kebijakan	Pasif
Target B18: Tidak ada target	Capaian Target: Tidak ada target	Nilai: Tidak ada target
	Proses Ko-kreasi: Tidak ada target	Tidak ada target
Ukuran Keberhasilan 4: Penyajian data SDA-LH dalam portal Satu Data Indonesia		
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional		
Target B06: Tidak ada target	Capaian Target: Tidak ada target	Nilai: Tidak ada target
	Proses Ko-kreasi: Tidak ada target	Tidak ada target
Target B12: Tidak ada target	Capaian Target: -	Nilai: -
	Proses Ko-kreasi: -	-

Target B18: Tidak ada target	Capaian Tidak ada target	Target:	Nilai: Tidak ada target
	Proses Tidak ada target	Ko-kreasi:	Tidak ada target
Catatan Pelaksanaan: Seluruh Stakeholders belum mengirimkan data dukung. Data Dukung perlu dikirimkan paling lambat 14 Hari setelah Laporan Monev dipublikasikan.			